MONOGRAF

PERGULATAN MINORITAS MUSLIM THAILAND

Menelisik Peran Akademisi, Tokoh Agama & LSM dalam Upaya Mencari Solusi Konflik Berkepanjangan

Dr. Hj. Helmiati, M.Ag
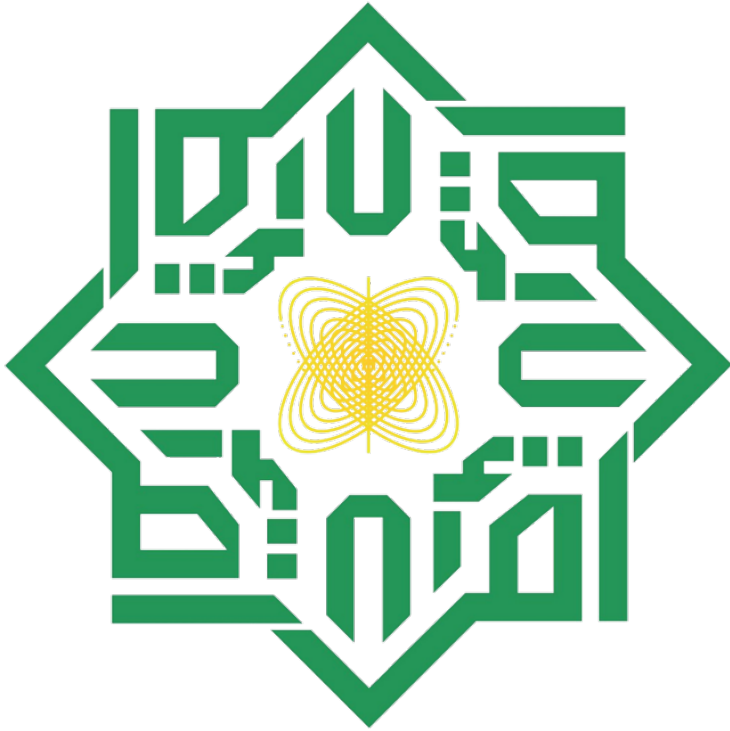
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Sultan Syarif Kasim

PEKANBARU – RIAU

Dr. Hj. Helmiati, M.Ag

MONOGRAF

PERGULATAN MINORITAS MUSLIM THAILAND

Menelisik Peran Akademisi, Tokoh Agama & LSM dalam Upaya Mencari Solusi Konflik Berkepanjangan

MONOGRAF
PERGULATAN MINORITAS MUSLIM THAILAND
Menelisik Peran Akademisi, Tokoh Agama & LSM dalam Upaya Mencari Solusi Konflik Berkepanjangan

Penulis : Dr. Hj. Helmiati, M.Ag

ISBN : 978-623-329-611-3

Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; Hal: viii + 74

Desainer sampul : An Nuha Zarkasyi
Penata isi : Hasan Al Mumtaza

Cetakan 1, Januari 2022

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
CV. Literasi Nusantara Abadi
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: penerbitlitnus@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami persembahkan ke hadirat Allah swt, yang telah menganugerahkan rahmat, taufiq dan hidayah serta inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan monograf ini. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia.

Monograf dengan judul: *"Pergulatan Minoritas Muslim Thailand Menelisik Peran Akademisi, Tokoh Agama & LSM dalam Upaya Mencari Solusi Konflik Berkepanjangan*" adalah hasil penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2016 di Negara Thailand. banyak pihak, lembaga maupun individu yang telah memberikan bantuan, dukungan dan partisipasi, baik materil maupun spiritual, baik yang di Indonesia maupun Thailand dimana penelitian ini diadakan. Oleh karena itu, kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih yang tulus.

Penelitian ini dibiayai dengan anggaran UIN Suska Riau. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, dan segenap pimpinan UIN Suska Riau. Akhirnya hanya kepada Allah semata kami memohon semoga amal baik mereka diterima dan dilipatgandakan pahalanya, dan semoga penelitian ini bermanfaat baik secara akademik maupun sosial kemasyarakatan.

Pekanbaru, I Januari 2022
Penulis,

Dr. Hj. Helmiati, M.Ag

Abstrak

Di Thailand Selatan telah lama terjadi konflik antara minoritas Muslim (separatis) dengan pihak pemerintah. Di tengah pusaran konflik dan kekerasan yang terjadi, ada realitas yang menarik, yaitu menguatnya gerakan yang berorientasi perdamaian, dimana terdapat pihak-pihak yang terus-menerus mengusahakan terjadinya perdamaian dan mencari solusi konflik antara minoritas Muslim dan pemerintah pusat tanpa harus mereduksi prinsip-prinsip tuntutan atau aspirasinya. Mereka adalah dari kalangan akademisi, kalangan terdidik, budayawan, tokoh agama dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pertanyaannya adalah Bagaimana peran akademisi, tokoh agama, dan LSM dalam upaya mencari solusi konflik bagi minoritas Muslim di Thailand Selatan? Bagaimana pandangan dari masing-masing kelompok dan perorangan serta hubungan antar mereka dan kendala-kendala yang dihadapi atas konflik dan kekerasan yang berkepanjangan di Thailand Selatan? Bagaimana kalangan akademisi, tokoh agama dan LSM membangun konsep harmonisasi kultural, termasuk agama, serta menegosiasikan kepentingan politik di antara mereka sendiri, antara Muslim minoritas dengan penduduk mayoritas serta pemerintah pusat?

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan kombinasi antara pendekatan dan metode penelitian sejarah. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas atau keabsahan data diperiksa dengan metode triangulasi. Seluruh data yang terhimpun itu dikaji, dianalisis dan diinterpretasi, untuk diartikulasikan dalam konstruksi pembahasan yang sistematis, logis dan komprehensif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kalangan terdidik seperti akademisi, tokoh agama dan LSM memainkan peran penting dalam membangun perdamaian di Thailand Selatan. Mereka mengambil strategi non-partisan atas kelompok-kelompok separatis yang sudah ada. Mereka

lebih menekankan pada penyadaran masyarakat melalui penguatan ekonomi dan artikulasi politik melalui pembangunan kesejahteraan dan penyelesian masalah-masalah sosial yang rentan terhadap konflik, ketimbang memobilisasi masyarakat untuk membentuk gerakan tertentu. Mereka memanfaatkan keterbukaan untuk mengungkapkan agenda dan misinya kepada publik baik melalui media massa, publikasi, orasi, seminar, ceramah agama maupun melalui pengembangan SDM dan kapasitas masyarakat secara langsung. Hal ini menampakkan harapan baru bagi tercapainya suatu solusi yang lebih substansial bagi perdamaian.

Kelompok-kelompok ini cenderung mengabaikan perbedaan kelompok politik dan bahkan suku serta latar belakang pemahaman keagamaan jika terjadi perbedaan. Dalam suara-suara yang bersifat publik misalnya mereka tampak bersatu meskipun memiliki latar belakang organisasi dan pemahaman keagamaan yang berbeda. Dengan demikian, munculnya kelompok-kelompok civil society ini juga memunculkan pluralitas yang asli di Thailand Selatan yang selama ini tertutupi karena penyeragaman internal di antara mereka.

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah 'minoritas' merupakan tantangan serius terutama bagi negara-negara yang menganut demokrasi termasuk negara Thailand. Peningkatan jumlah kekerasan terhadap kelompok minoritas terutama karena basis agama dan keyakinan membahayakan integrasi bangsa dan memperlihatkan situasi yang mencemaskan. Demokrasi nampaknya masih menyisakan masalah terkait perwujudan keadilan bagi minoritas.1 Sebagian kalangan memandang demokrasi sebagai model yang tegak di atas hegemoni pihak mayoritas dan diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Tuntutan terhadap keadilan seperti ini lebih jauh menyebabkan lahirnya geraka*n yang me*nuntut fairness (keadilan), baik yang bersifat lunak maupun keras dan bahkan memilih untuk memisahkan diri (separatis).

Di Thailand, mayoritas penduduknya menganut Budha (± 94%). Muslim berjumlah 5.8 % dari total penduduk. 2 Dengan demikian mereka adalah kelompok minoritas, yang merasa belum mendapatkan keadilan terkait hak mereka sebagai warga negara. Minoritas Muslim Thailand telah berjuang sejak lama menuntut keadilan. Sebagian kalangan menempuh jalan kekerasan d*an separatisme, seperti "The National Front for Patani, Patani National L*iber*ation Front dan Patani United Liberat*ion Organization (PULO)". Perjuangan mereka telah sejak lama berlangsung, setidaknya ketika nasionalisme Eropa diperkenalkan ke negara-negara Asia pada pertengahan abad ke-19, atau bahkan sejak awal masa kolonialisme itu sendiri.

Asal-usul konflik di Thailand Selatan dapat ditelusuri dari kebijakan kolonial Inggris yang membenarkan dan mendukung pemisahan suku Melayu (yang dulu berada di dalam wilayah kesultanan Patani) menjadi dua komunitas. Satu komunitas tergabung dengan Kerajaan Siam (Thailand) dan yang lainnya digabungkan dengan komunitas Melayu di bawah koloni

---

1 Laporan Penelitian pada LPPM UIN Suska Riau tahun 2016.Swain, Ashok (2008), "Democracy, Minority Rights and Conflict Prevention in Asia," in Ciska Raventos [ed], *Democratic Innovation in the South: Participation and Representation in Asia, Africa and Latin America* (Buenos Aires: Clacso Books, 2008), hlm. 221; Eerik Lagerspetz, *The Philosophy of Democracy and the Paradoxes of Majority Rule,* dalam *Finnish Yearbook of Political Thought, Vol.1, 1997;* hlm. 221.

2 *Muslim Population by Country: How Big will each Muslim Population be by 2030,* theguardian.com; *Islam by Country,* en.m.wikipedia.org, diakses tanggal 6 April 2016.

Inggris yang kemudian menjadi negara Malaysia. Ketegangan dan konflik mulai terjadi saat Kerajaan Thai/Siam mengembangkan nasionalisme modern Thailand dengan wujud kerajaan konstitusional.3 Bersamaan dengan itu pemerintah memaksakan identitas dan integrasi nasional yang mencakup kesamaan identitas kultural termasuk di dalamnya bahasa dan nilai-nilai budaya Thai dan ideologi nasionalnya yang memiliki akar yang kuat dari Budhisme, dimana hal tersebut tidak jarang dinilai bertentangan dengan keyakinan agama yang dianut minoritas Muslim Thailand. Karena minoritas Muslim Thailand Selatan dilihat dari aspek budaya yang mencakup bahasa, agama dan kultur, adalah bagian dari bangsa Melayu yang beragama Islam, berbudaya dan berbahasa Melayu rumpun dengan Melayu Malaysia. Ini berbeda dengan mayoritas penduduk di negara Thailand yang merupakan etnis Thai, menganut agama Budha, dan berbahasa Thai.4 Kebijakan Thaisasi –pemaksaan bahasa, budaya dan nilai-nilai budaya Thai– dirasa tidak adil mengingat hal itu dapat mengancam dan menghilangkan identitas Melayu dan Muslim mereka. Ini menimbulkan resistensi kuat komunitas Melayu karena terjadi benturan budaya yang sangat keras. Namun demikian --seperti penilaian Davis Brown-- konsep integrasi Thailand adalah langkah konsolidasi pemerintahan Thai terhadap Patani dan mewujudkan *mono ethnic character of the state* (ethnic tunggal yang menjadi ciri khas Thailand).[5]

Selain itu, minoritas Muslim di Thailand Selatan secara historis mengklaim wilayah tempat tinggal mereka dulunya adalah wilayah kekuasaan Kerajaan Islam Patani sebelum dikuasai Siam (Thai) dan kemudian menjadi bagian dari negara Thailand. Ini membuat mereka merasa mempunyai legitimasi untuk menyatakan bahwa wilayah mereka bukanlah bagian integral dari wilayah kekuasaan kerajaan Thailand. Karena itu, mereka menuntut merdeka atau menjadi daerah otonom.[6] Persoalan ini turut menjadi akumulasi masalah dan identitas politik yang berbenturan dengan kepentingan pemerintah Thailand.

Lebih jauh, konflik dan kekerasan yang berkepanjangan di Thailand Selatan selain disebabkan oleh perbedaan pandangan dan kepentingan politik serta perbedaan kultural antara minoritas Muslim dan pemerintah,

---

3 Surin Pitsuwan, *Islam and Malay Nationalism: A Case Study of the Malay Muslims of Southern Thailand,* terj. Hasan Basri, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 21.

4 W.K. Che Man, *Muslim Separatism the Moros of Southern Philipines and the Malays of Southern Thailand*, (Manila: Ateneo de Manila University Press, 1990), hlm. 43-44.

5 Davis Brown, From Pheriperal Communities to E thnic Nation, *Journal of Pasific Affairs* 61, 1988, hlm. 51.

6 Chumphot Nurakkate, *The Conflict in Southern Thailand,* SIPRI Policy Paper No.20, Centre for Defence and Strategic Studies, Australian Defence College, 2012), hlm. 6.

juga didorong oleh kesenjangan ekonomi, infrastruktur, sarana dan prasarana, fasilitas layanan publik serta kesenjangan peran politik antara komunitas Muslim di Thailand selatan versus mayoritas Thai ikut serta pula memperpanjang konflik. Etnis Thai meskipun minoritas di Selatan, mereka tergolong *middle class* dalam ekonomi, bekerja sebagai pemimpin utama lembaga pemerintah, pegawai, atau pengusaha.[7] Hal ini, pada gilirannya menyebabkan ketidakpuasan yang selanjutnyaaa konflik dan kekerasan meskipun belakangan pemerintah Thailand telah berusaha menerapkan langkah tertentu untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Uraian di atas menggambarkan perbedaan yang signifikan antara minoritas Muslim di satu sisi dengan mayoritas non-Muslim dan pemerintah di sisi lain. Mereka tidak hanya berbeda dalam hal kepentingan politik dan kultural yang mencakup agama dan keyakinan, bahasa, dan budaya. Namun demikian, pemerintah pusat tetap memaksakan asimilasi kultural dan integrasi nasional.[8] Yang menentang kebijakan tersebut memperoleh konsekuensi seperti ditangkap, dipenjara bahkan sampai ada yang dibunuh.[9]

Hingga kini, ketegangan dan kekerasan sewaktu-waktu masih terjadi disebabkan jalan buntu dialog formal melalui negosiasi politik, dan karena rasa ketidakadilan menimbulkan kekerasan yang berkelanjutan. Hanya intensitasnya yang kadang meningkat dan kadang berkurang. Dari 1979 sampai akhir 2003, 233 kematian dikaitkan dengan kekerasan politik di tiga provinsi Pattani, Yala dan Narathiwat. Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, tepatnya pada bulan Ramadhan tahun 2004 terjadi peristiwa berdarah di Takbai yang menyebabkan 78 orang meninggal dunia. [10]

---

7 Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara,* (Pekanbaru: Alaf Baru & Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Suska Riau), 2014, hlm. 232.

8 Deliar Noer dalam M.B. Hooker, *Islam in South-East Asia,* (Leiden: E.J. Brill, 1988), hlm. 211. Pemberontakan di Thailand selatan aktif terutama di provinsi Narathiwat, Pattani dan Yala. Ada juga beberapa kekerasan di bagian Songkhla, terutama di beberapa kabupaten mayoritas Muslim dan di Hat Yai, wilayah komersil dan kota terbesar di Selatan. Provinsi tetangga Satun juga memiliki sebagian besar penduduk Melayu Muslim namun belum terpengaruh secara signifikan. Lihat Neil J. Melvin, *Conflict in Southern Thailand: Islamism, Violence and the State in the Patani Insurgency,* (Sweden: Stokholm International Peace Research Institute, 2007), hlm. 5

9 Thanet Aphornasuvan, "Nation-State and the Muslim Identity in the Southern Unrest and Violence," dalam Imtiyaz Yusuf dan Lars Peter Schmidt, eds. *Understanding Conflict and Approaching Peace in Southern Thailand* (Bangkok: KAS, 2006), hlm. 105-110.

10 Peristiwa berdarah Tak Bai bermula ketika enam orang laki-laki setempat ditahan pihak militer dan dituduh mempersenjatai pihak pemberontak. Penahanan mereka dibantah oleh penduduk lokal yang kemudian berkumpul dan melakukan unjuk rasa menuntut pembebasan mereka. Unjuk rasa itu menjadi kekerasan fisik ketika pihak militer menembaki mereka

Pada tahun yang sama kembali terjadi pembantaian oleh militer di sebuah masjid di Thailand Selatan yang menyebabkan ratusan korban di kalangan Muslim. Berikutnya, konflik dan kekerasan silih berganti terjadi. Bahkan menurut perkiraan baru-baru ini ada 4.100 orang meninggal dan 6.509 orang terluka sejak tahun 2004.[11]

Sebagaimana diuraikan di atas, konflik berkepanjangan ini terlibat di dalamnya unsur agama, politik, etnis, yang berhimpitan dengan elemen kedaerahan. Kondisi ini mempersulit proses dialog antar aktor-aktor yang berkonfik, meski beberapa negara turut berkontribusi mencari penyelesaian, seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI), Malaysia, dll.

Dalam kasus minoritas Muslim Thailand, alternatif-alternatif seperti otonomi, atau merdeka terus menjadi pergulatan yang tak sederhana dan mudah. Namun belakangan, proses tersebut menampakkan kecenderungan yang kuat ke arah alternatif otonomi. Namun demikian, otonomi seperti apa yang akan terwujud, tidaklah mudah untuk mendefinisikannya karena mayoritas Thai Budhis dan pemerintah pusat tidak ingin kehilangan wewenangnya atas wilayah tersebut.

---

dengan gas air mata dan meriam sehingga menyebabkan enam lelaki tersebut mati ditembak. Ratusan warga yang kesemuanya beragama Islam kemudiannya ditangkap dan dibawa dengan truk dalam keadaan terbaring bertindihan ke sebuah camp militer di Pattani. Ketika truk tersebut tiba di Camp tersebut beberapa jam kemudian, sebagian mereka ditemukan telah meninggal dunia akibat sesak nafas karena tidak cukup mendapakan oksigen untuk bernapas ketika diangkut ketempat penjara yang memerlukan 5 jam waktu perjalanan. Peristiwa berdarah pada 24 Oktober 2004, di bulan Ramadan itu mengundang kecaman internasional dan semakin meningkatkan intensitas konflik dan kerusuhan di Thailand Selatan. Lihat, https://ms.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_berdarah_Tak_Bai diakses pada 12 Juli 2016.

11 Srisompob Jitpiromomsri, "*The Southern Thai Conflict Six Years On: Insurgency, Not Just Crime*", Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, Published by Institute of Southeast Asian Studies, Volume 32, Number 2, August 2010, hlm. 157; Brain Mc Cartan and Shawn W Crispin, "An Atol Investigation, Southern Test for New Thai Leader", http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/JL2Aeo2.html (accessed December 23, 2008). Lihat juga Neil J. Melvin, *Conflict in Southern Thailand,* hlm. 9.

Seiring dengan perjalanan waktu dan karena berbagai upaya yang telah dilakukan, baik pemerintah pusat maupun gerakan separatis di Selatan telah mengalami transformasi. Gerakan separatis telah merubah orientasinya dari yang dulu menuntut merdeka, belakangan menuntut hak otonomi dan "*ancestral domain*". Demikian pula, negara juga telah bertransformasi dari kecenderungan menggunakan strategi "penyeragaman politik dan budaya" dan pendekatan represif menjadi "strategi yang lebih terbuka" serta mengalokasikan dana yang lebih besar untuk pembangunan wilayah selatan dibanding sebelumnya serta menerapkan desentralisasi politik terbatas. Namun, kenyataan ini bisa dikatakan masih jauh dari tuntutan esensial minoritas Muslim Thailand Selatan. Ada sejumlah aspirasi esensial dalam tuntutan Muslim selatan yang belum terpenuhi seperti wewenang penuh terhadap pengelolaan sumber daya alam di Selatan; pemilihan gubernur oleh rakyat setempat secara langsung dan mandiri; otoritas politik terhadap komunitas mereka sendiri. Singkatnya, tuntutan mereka adalah "*self-government* atau *self-determination* minus pemisahan diri".

Perjuangan minoritas Muslim menuntut keadilan dalam dugaan sebagian kalangan terutama yang diberitakan oleh massa sejauh ini, seolaholah hanya dilakukan melalui pemberontakan dan sikap separatisHal tersebut memperparah kesengsaraan minoritas Muslim dan minoritas non-Muslim pada umumnya. Dalam kenyataannya, di tengah pusaran konflik dan kekerasan yang terjadi, ada realitas yang menarik, yaitu menguatnya gerakan yang berorientasi perdamaian. Di balik konflik dan kekerasan berkepaaanjangan, ada actor-aktor yang selalu berusaha mencari alternatif penyelesaian melalui perdamaian. Mereka adalah tokoh dan individu yang terus-menerus mengusahakan terjadinya perdamaian dan mencari solusi konflik antara minoritas Muslim dan pemerintah pusat tanpa mengurangi substansi tuntutan atau aspirasinya. Mereka adalah dari kalangan akademisi, kalangan terdidik, profesional, budayawan, kelompok keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Secara umum, LSM semakin berperan aktif dalam upaya mewujudkan perdamaian di beberapa negara. Keikutsertaan LSM di "era globalisasi diharapkan mampu menembus tembok penghalang perdamaian". Karena sesuai batasan maknanya, LSM dinilai tidak seperti negara dan partai politik, mengingat tidak memiliki kepentingan tertentu. Kepentingan utamanya dalama konteks ini hanyalah mewujudkan dan memelihara perdamaian.

Gerakan mencari solusi konflik dari kalangan akademisi, kalangan terdidik, profesional, budayawan, kelompok keagamaan dan LSM –sebagaimana disebutkan di atas– berjarak dengan kelompok-kelompok

separatis. Mereka lebih cenderung pada strategi non-partisan terhadap pihak-pihak yang sejauh ini cenderung memisahkan diri dari negara seperti *The National Liberation Front of Patani* (NLFP), *Liberation Front of Republic Patani* (LFRP) dan *Patani United Liberation Organization* (PULO).

Mengingat konflik dan kekerasan di Thailand Selatan berakar pada identitas kultural dan bukan hanya tentang kepentingan politik, maka upaya penyelesaiannya mesti mencari titik temu dan solusi pada tataran itu. Permasalahannya adalah, bagaimana kalangan akademisi, LSM dan profesional membentuk konsep harmonisasi budaya seperti bahasa, agama, serta klaim historis atas wilayah serta bagaimana pula mereka menegosiasikan interes politik di kalangan mereka sendiri, antara minoritas Muslim dan mayoritas non Muslim serta dengan pemerintah pusat?

Lebih jauh, di sisi lain, pada komunitas Muslim sendiri, termasuk yang terlibat dalam gerakan mencari solusi konflik terdapat pula pihak-pihak dan personal yang memiliki pandangan dan agenda yang berbeda satu sama lain. Karena identitas Muslim di negara ini pada dasarnya tidak bersifat tunggal seperti yang dikesankan sejauh ini melainkan plural. Selama ini Muslim dikesankan terutama oleh media seolah-olah homogen, dan kesan tersebut telah tertanam dalam pikiran banyak orang. Heterogenitas dan pluralitas Muslim di Selatan terlihat dari keragaman gerakan dan pandangan perorangan, kelompok dan organisasi dalam upaya mencari solusi damai. Oleh karena itu, studi ini juga berupaya menggali pandangan individu, kelompok serta mencermati hubungan yang terjalin antar mereka serta masalah-masalah yang mereka hadapi akibat konflik dan kekerasan yang berkepanjangan antara minoritas Muslim Thailand Selatan dengan pemerintah pusat.

Bagi negara Indonesia, yang kini masih mengalami persoalan serius dan tindakan kekerasan terhadap minoritas,[12] penelitian ini menjadi penting, mengingat akar persoalan dari relasi mayoritas-minoritas sesungguhnya adalah masalah keadilan (*justice*). Persoalan terkait 'Minoritas' adalah perkara mewujudkan keadilan atas nama kemanusiaan, tidak hanya perkara agama. Pemerintah diharapkan memiliki formulasi, konsep serta manajemen yang tepat dalam mewujudkan hak-hak dan keadilan bagi minoritas dan warga negara.

12 Ahmad Suaedy dkk., Islam dan Kaum Minoritas: Tantangan Kontemporer, (Jakarta: The Wahid Institute, 2012)

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneleliti lebih jauh beberapa permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana peran akademisi, tokoh agama, dan LSM dalam upaya mencari solusi konflik bagi minoritas Muslim di Thailand Selatan?
2. Bagaimana pandangan perorangan, masing-masing kelompok dan hubungan antar mereka serta masalah yang mereka hadapi dalam upaya mencari solusi konflik dan kekerasan yang berkepanjangan di Thailand Selatan?
3. Bagaimana kalangan akademisi, tokoh agama dan LSM membangun konsep harmonisasi kultural, termasuk agama, serta merekonsiliasikan kepentingan antara minoritas Muslim dan warga mayoritas non-Muslim serta pemerintah pusat, dan antar mereka sendiri?

C. Tujuan Penelitian

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana peran akademisi, tokoh agama dan LSM dalam upaya mencari solusi konflik bagi minoritas Muslim di Thailand Selatan.
2. Mengetahui bagaimana pandangan perorangan, masing-masing kelompok dan hubungan antar mereka serta masalah yang mereka hadapi dalam upaya mencari solusi konflik dan kekerasan yang berkepanjangan di Thailand Selatan.
3. Mengetahui bagaimana kalangan akademisi, tokoh agama dan LSM membangun konsep harmonisasi kultural, termasuk agama, serta merekonsiliasikan kepentingan antara minoritas Muslim dan warga mayoritas non-Muslim serta pemerintah pusat, dan antar mereka sendiri?

D. Kegunaan Penelitian

Gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan penelitian ini diharapkan menjadi informasi baru yang penting dan berguna dalam rangka melihat alternatif solusi terhadap konflik intra-nasional yang berkepanjangan di Thailand. Selain itu, juga diharapkan memberikan gambaran yang jelas terutama bagi kelompok minoritas Muslim Thailand agar dapat menentukan jenis pandangan Islam yang manakah (dalam pengertian interpretatif), serta konsep harmonisasi kultural dan politik yang mana yang efektif dalam menegosiasikan kepentingan politik antar berbagai pihak sehingga

terjalin hubungan yang damai antar berbagai pihak di Thailand. Uraian tentang pengalaman minoritas Muslim dalam upaya resolusi konflik dan perjuangan mereka untuk melestarikan budaya dan mengamalkan ajaran agama juga diharapkan dapat mengilhami dan mengispirasi kaum Muslim di belahan bumi lainnya –khususnya Indonesia– dalam menggairahkan kehidupan beragama serta menghargai kelompok minoritas. Hal ini juga bermakna dalam rangka mewujudkan misi perdamaian dan pengembangan budaya damai, serta penguatan kesadaran *multicultural* sebagai perwujudan dari Islam yang *rahmatan lil alamin*.

Secara akademis, hasil penelitian ini pada gilirannya sangat berguna untuk pembaharuan bahan ajar mata kuliah Studi Islam Asia Tenggara (SIAT) yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa UIN Suska. SIAT secara keilmuan tergolong relatif baru dan masih sangat terbuka untuk menjadi subjek penelitian dan pengembangan, selain itu SIAT juga menjadi distingsi serta *excelence* yang membedakan UIN Suska dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) lainnya, sesuai dengan keberadaan UIN Suska sebagai pusat Studi Islam Asia Tenggara.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Antara Integrasi dan Disintegrasi Bangsa (Nasional)

Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Integrasi berasal dari bahasa inggris "*integration*" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memilki keserasian fungsi. Integrasi nasional merujuk kepada seluruh unsur dalam rangka melaksanakan kehidupan bangsa, meliputi sosial, budaya ekonomi, maka pada intinya integrasi nasional lebih menekankan persatuan persepsi dan prilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian Integrasi nasional dapat diartikan penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa.

Sedangkan disintegrasi bangsa yaitu perpecahan atau hilangnya persatuan suatu bangsa yang mengakibatkan perpecahan. Secara umum pernyebab disintegrasi bangsa adalah karena rasa tidak puas dan rasa ketidakadilan oleh masyarakat terhadap pemerintah yang mengakibatkan pemborantakan atau separatisme. Walaupun begitu, banyak faktor lain yang menyebabkan disintegrasi suatu bangsa seperti timbulnya perpecahan antar suku dan agama, konflik berkepanjangan, ketidakpercayaan, perang saudara, dan lain-lain.

Integrasi dan disintegrasi sangat tergantung pada kesanggupan negara dan pemerintah dalam memelihara komitmen dan isi kesepakatan bersama untuk hidup berbangsa dan bernegara. Kesepakatan ini tidak hanya dari penguasa, melainkan juga warga negara yang menginginkan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan, mengingat perwujudan integrasi dan disintegrasi suatu bangsa sangat ditentukan oleh prinsip- prinsip ini (keadilan, jaminan kesejahteraan sosial, ekonomi, demokrasi, jaminan hukum, serta jaminan HAM).

2. **Agama sebagai Faktor Integratif dan Disintegratif**

Agama adalah sistem kepercayaan yang diyakini kebenarannya dan diaplikasikan dalam kehidupan. Menurut para perintis sosiologi, agama (*religion*) adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci, dan bahwa kepercayaan dan praktik tersebut mempersatukan semua orang yang beriman ke dalam sebuah komunitas moral yang disebut umat. Bagai dua mata sisi mata uang, agama mempunyai sisi positif dan negatif. Dari sisi positif, agama berfungsi sebagai alat pemersatu masyarakat. Menurut Durkheim agama mempunyai fungsi positif bagi integrasi bangsa baik secara mikro ataupun makro. Fungsi mikro agama adalah untuk menggerakkan dan membantu manusia untuk hidup. Di tingkat makro, agama berfungsi untuk memenuhi keperluan masyarakat untuk secara berkala menegakkan dan memperkuat perasaan dan ide kolektif yang menjadi ciri dan inti persatuan masyarakat tersebut dengan upacara keagamaan. Dari sisi negatif, agama dapat memicu disintegrasi bangsa. Disintegrasi adalah perpecahan di masyarakat yang terjadi karena adanya konflik atau pertentangan. Lebih jauh lagi, konfliklah yang membuat disintegrasi. Konflik adalah pertentangan-pertentangan yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan dalam masyarakat.

3. **Minoritas Muslim dan Perspektif Islam**

Sejauh ini tidak ada definisi tunggal tentang minoritas. Secara bahasa, minoritas dimaknai sebagai "golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibanding golongan lain dalam suatu masyarakat, dan karena itu didiskriminasikan golongan lain".[13] Secara sosiologis, mereka yang digolongkan minoritas setidaknya memenuhi tiga kriteria:

> "*Pertama*, anggotanya sangat tidak diuntungkan sebagai akibat dari tindakan diskriminasi orang lain terhadap mereka. *Kedua*, anggotanya memiliki solidaritas kelompok dengan "rasa kepemilikan bersama", dan mereka memandang dirinya sebagai "yang lain" sama sekali dari kelompok mayoritas. *Ketiga*, biasanya secara fisik dan sosial terisolasi dari komunitas yang lebih besar".[14]

---

13 Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2005), 745.

14 Eddie Riyadi Terre "Posisi Minoritas dalam Pluralisme: Sebuah Diskursus Politik Pembebasan" dalam http://interseksi.org/publications/essays/articles/posisi_minoritas.html (diakses 8 November 2012).

“Dalam beberapa kasus, ukuran kuantitas juga bukan satu-satunya standar mendefinisikan minoritas. Ada kelompok yang dari sisi jumlah mayoritas, tetapi berada pada posisi non-dominan seperti kelompok kulit hitam di bawah rezim Apartheid di Afrika Selatan atau masyarakat Tionghoa di Indonesia sebagaimana dijelaskan sebelumnya”.[15]

Definisi lainnya yang membantu datang dari ‘Francesco Capotorti, *Special Rapporteur* PBB untuk subkomisi Pencegahan Diskrminasi dan Perlindungan Minoritas, tahun 1977’. Francesco menyatakan:

“Minoritas, adalah sebuah kelompok yang dari sisi jumlah lebih rendah dari sisa populasi penduduk suatu negara, berada dalam posisi tidak dominan, yang anggotanya –menjadi warga negara suatu negara—memiliki karakteristik etnis, agama, bahasa, yang berbeda dari sisi penduduk dan menunjukan, meski hanya secara implisit, rasa solidaritas yang diarahkan untuk melestarikan budaya, tradisi, agama, dan bahasa mereka”.[16]

Definisi yang cukup membantu dimuat dalam dokumen PBB:

“Minority is a group numerically inferior to the rest of the population of a State, in a non-dominant position, whose members—being nationals of the State—possess ethnic, religious or linguistic characteristics differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards preserving their culture, traditions, religion or language”.[17]

Definisi di atas merangkum dua kategori sekaligus. Pertama kategori objektif berupa fakta tetang kuantitas yang lebih rendah dari sisa populasi penduduk di suatu negara sehingga berada dalam posisi tidak dominan. Kedua, kategori subjektif, yaitu memiliki rasa solidaritas sebagai komunitas minoritas yang diarahkan untuk melestarikan budaya, tradisi, agama, dan bahasa mereka.

---

15 Ahmad Suaedy, dkk., *Islam dan Kaum Minoritas: Tantangan Kontemporer,* (Jakarta: the Wahid Institute, 2012).

16 Studi ini dicatat dalam dokumen E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1, para. 568 dalam “Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation,” United Nations, 2010, 2. http://www.ohchr.org/Documents/ Publications/MinorityRights_en.pdf (diakses 28 November 2012).

17 United Nations, *Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation,* (New York and Genewa: United Nations, 2010, hlm.2.

Menurut Makesell dan Murphy[14]

> "ada dua kategori minoritas. *Pertama*, *minority-cum-territorial ideology*, minoritas yang memiliki klaim teritori tertentu. Minoritas-*cum*-teritorial bukan hanya mengklaim atas budaya, bahasa dan mungkin agama melainkan juga penguasaan atas wilayah tertentu dimana mereka tinggal secara turun temurun. Kategori ini bisa diterapkan pada kasus *indigenous people* dan konflik Papua serta Aceh di masa lalu. *Kedua*, *minority non-territory*, minoritas yang tidak memiliki klaim atas teritorial tertentu. Minoritas nonteritori hanya mengklaim kebebasan ekspresi dan tradisi yang mereka miliki yang berbeda dengan identitas nasional, dan pada umumnya hegemonik. Hal ini berlaku untuk kasus minoritas agama atau keyakinan dan kelompok-kelompok sosial baru seperti homoseksual, peduli lingkungan, dan sebagainya".

Sementara dari perspektif sosiologis, 'minoritas' diklasifikasikan menjadi minoritas agama, minoritas ras, minoritas bahasa dan minoritas etnis. Minoritas agama terdapat di sejumlah negara. Bahkan hampir setiap negara di dunia mempunyai kelompok minoritas agama. Seperti halnya agama dan kepercayaan, ras mayoritas dan minoritas juga selalu ada di setiap Negara.[18] Dalam aspek bahasa, juga terdapat kelompok minoritas bahasa. Di antara 193 negara internasional yang berdaulat, jumlah bahasa di dunia mencapai 50007000, minoritas bahasa hampir dapat dipastikan ada.[19] *Keempat*, minoritas etnik. Menurut Martin Bulmer, "kelompok etnik adalah sebuah kolektivitas dalam populasi yang lebih besar, nyata atau diduga memiliki nenek-moyang yang sama, kenangan masa lalu bersama, dan sebuah fokus budaya pada satu atau lebih elemen simbolis yang menentukan identitas kelompok seperti kekerabatan, bahasa agama, wilayah bersama, kebangsaan atau penampilan fisik".[20]

---

18 "Native America" http://www.minorityrights.org/2615/unitedstates-of-america/native-americans.html (diakses 8 November 2012).

19 "Minority language" http://en.wikipedia.org/wiki/Minority_language (diakses 8 November 2012).

20 T. Modood dan R. Berthoud (1997) menyampaikan definisi lain yang lebih memberi penekanan pada unsur subyektivitas yang ada di dalamnya. Mereka memandang kelompok etnis biasanya mempunyai warisan sama yang memiliki perbedaan dengan masyarakat lain. Ada batas yang memisahkan "kami" dengan "mereka" di sana, dan batas itu memang diakui adanya. Etnisitas, kata keduanya, memang "fenomena *multi-faceted*, yang berdasaarkan pada penampilan fisik, identifikasi subjektif, afiliasi budaya dan agama, stereotip, dan pengucilan sosial". Lihat "Ethnicity: Introductory User Guide ESDS Government," updated January

Pengalaman umat Islam menjadi minoritas terjadi pada periode awal kedatangan Islam di Mekah dan saat umat Islam hijrah ke Hafsah dan Madinah. Walaupun selanjutnya mereka mampu merobah kondisi dengan menjadikan dirinya sebagai mayoritas yang hidup berdampingan dengan minoritas, namun ekspansi Islam lebih jauh menyebabkan umat Islam tinggal di wilayah atau masyarakat non-muslim.[21] Khaled Abou El Fadl berpendapat:

> "Diskursus tentang minoritas Islam yang tinggal di komunitas non-Islam tidak banyak berkembang hingga abad ke-17 M kecuali hukum tentang boleh tidaknya orang Islam hidup di dalam mayoritas non-muslim dalam suatu komunitas atau negara. Imam Hanafi, misalnya, masih menurut Fadl, dengan alasan akan terjadinya kesulitan untuk mengamalkan Islam maka ia mengharamkan orang Islam hidup di komunitas atau negara yang mayoritas non-muslim". [22]

Saat ini kondisi telah jauh berubah. Globalisasi memungkinkan orang pindah dari satu negara ke negara lain dan paham nasionalisme meniadakan batas-batas etnis dan agama untuk hidup berdampingan dalam satu negara-bangsa. Namun demikian, nasionalisme *nation-state* di sisi lain juga menyebabkan sebagian umat Islam dan komunitas lainnya, sewaktu-waktu menjadi kelompok minoritas yang pada awaalnya adaalah mayoritas di suatu kawasan seperti yang terjadi di Thailand Selatan, Singapura, Filipina Selatan dan lain sebagainya. Di sisi lain, arus baru migrasi penduduk menyebabkan populasi minoritas muslim pada negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika meningkat secara signifikan dan menuntut kajian dan diskursus tentang minoritas Islam. Dengan kata lain, secara garis besar di dunia terdapat dua jenis minoritas Muslim, yaitu minoritas Muslim pribumi (*native*) dan minoritas Muslim imigran. Muslim pribumi umumnya tinggal di negara-negara dunia ketiga seperti Asia Tenggara dan Eropa Timur, sedangkan minoritas Muslim imigran terutama tinggal di kota-kota besar dan negara-negara maju. Relasi baru antara minoritas Muslim di suatu negara dengan mayoritas non-Muslim menuntut diskursus baru

---

2012, 6 http://www.esds.ac.uk/government/docs/ethnicityintro. pdf (diakses 8 November 2012).

21 Muhammad Yasin Mazhar Siddiqi, *Prophet Muhammad SAW: A Role Model for Muslim Minorities* (Leicestershire: Islamic Foundation, 2006).

22 Khaled Abou El Fadl, "*Islamic Law and Muslim Minorities: e Juris- tic Discourse on Muslim Minorities from 8th to 17th Century CE / 2th to 11th Century Hijrah*" (MUIS Occational Papers Series, Singapore, 2006).

menurut perspektif Islam.

Dalam konteks inilah reformulasi pendekatan baru menegenai kelompok minoritas menjadi urgent, tidak hanya terkait minoritas muslim tetapi juga berkaitan dengan minoritas non-muslim. Kajian fikih minoritas (*fiqh al-aqalliyyȃt*) dengan demikian menjadi sangat penting. Diharapkan dengannya tumbuh perilaku dan sikap yang lebih ramah dan toleran terhadap minoritas.

> "Kehadiran gagasan mengenai fikih minoritas (*jurisprudence of minorities*) dianggap penting terutama untuk memandu kehidupan kaum muslim yang berposisi sebagai minoritas atau tidak tinggal di negara Islam. Tujuannya, agar mereka tetap nyaman sebagai muslim yang sempurna tanpa dibayang-bayangi ketakutan Islamnya kurang sempurna. Tokoh yang menyuarakan hal ini adalah Thaha Jabir al-Alwani dan Yusuf al-Qardlawi. Jabir menulis sejumlah tulisan, salah satunya berkenaan dengan *fiqh al-aqalliyyȃt,* yaitu *Nazharat Ta'sisiyat fi fiqh al-aqalliyyȃt* dan *Towards a Fiqh for Minorities: Some Basic Refections.* Sementara Yusuf al-Qardlawi mendirikan *European Council for Fatwa and Research* (ECFR) di London pada tahun 1997 dengan tujuan utama memberikan layanan hukum Islam pada mayarakat minoritas muslim di Eropa. Untuk itulah dia menulis buku khusus berjudul *Fiqh al-Aqalliyyȃt al-Muslimȃt, Hayȃt al-muslimȋn Wasatal-Mujtama`ȃtal-Ukhrȃ*".[23]

Dalam konteks ini ada sejumlah catatan penting yang patut disampaikan. Pertama, fikih minoritas menjadi usaha mewujudkan eksibilitas hukum Islam saat Muslim menjadi minoritas di suatu negara, atau saat mereka berada di negara yang dasar negaranya bukan Islam. Dalam konteks sosial politik, *fiqh al-aqalliyyȃt,* adalah fikih orang yang tak berdaya. Dalam kondisi ketidakberdayaan tersebut, pokok bahasannya antara lain misalnya terkait hukum konsumsi daging hewan yang penyembelihannya berkemungkinan tanpa membaca *basmalah,* hukum bekerja di café atau restoran yang menjual minuman keras, hukum mengucapkan salam pada non-muslim, memilih pemimpin dari kalangan non-muslim, dan lain sebagainya.

Kedua, fikih minoritas dengan cara berpikir seperti ini cenderung diposisikan sebagai "langkah darurat" dari kondisi yang dipandang

23 Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Aqalliyyȃt al-Muslimȃt, Hayȃt al-muslimȋn Wasatal-Mujtama`ȃtal-Ukhrȃ,* (Beirut: Dar al-Syuruq, 2001).

"tidak normal". Dengan menerapkan logika darurat seperti ini, umat Islam diperkenankan melakukan hal yang semula dilarang, atau sebaliknya diperbolehkan untuk tidak melakukan hal yang pada awalnya wajib. "A*ddharûratu tubîh al-mahzhûrât* (kondisi darurat memperbolehkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilarang)" menjadi kaidah fikih yang dapat dipegang untuk melegitimasi hal di atas.

4. Minoritas dalam Perspektif Resolusi Konflik

Globalisasi dan kuatnya politik identitas kembali memunculkan diskursus tentang minoritas. Hal ini terkait dengan hilangnya sekat-sekat antar negara dan bangsa dan tumbuhnya kesadaran pihak minoritas sebagai respon terhadap globalisasi. Kymlicka, menyampaikan uraian terkait sebab-sebabnya sebagai berikut:

> "Pertama, perkembangan demokrasi telah menyebabkan anggota kelompok minoritas mampu melakukan mobilitas sosial dan politik. Mereka tidak hanya tinggal dalam wilayah tertentu dan statis berinteraksi dalam kelompoknya melainkan mulai masuk ke ruang-ruang profesional dan kedudukan politik tertentu. Ini yang memungkinkan bangkitnya kesadaran akan pemenuhan hak-hak mereka dalam sebuah sistem yang dinilai tidak adil".[24]

Untuk konteks minoritas Muslim di Thailand yang memiliki perbedaan identitas politik dan kultural yang mencakup perbedaan agama, bahasa dan budaya dengan pemerintah dan mayoritas penduduk lainnya, pertanyaannya adalah apakah tidak mungkin terbangun titik temu antara identitas politik dan kultural tersebut? Jawabannya mungkin. Bert Klanderments, contohnya, memperlihatkan bahwa regenerasi aktivis dan pergantian pemimpin dapat menjadi salah satu faktor penting dari transformasi gerakan yang berbasis perbedaan identitas.[25]

> "Dengan adanya pergantian itu maka sebuah gerakan politik bisa berubah dari keras menjadi lunak dan sebaliknya tergantung berbagai faktor yang melingkupinya. Sementara itu,

---

24 Will Kymlicka dan Baogang He, ed., *Multiculturalism in Asia*, (New York: Oxford University Press, 2005).

25 Bert Klandermens, "Transient Identities? Memberships Pattern in the Dutch Peace Movement," dalam Enrique Laraña et. al., ed. *New Social Movements from Ideology to Identity,* (Philadelphia: Temple University Press, 1994), 168-170.

Ernesto Laclau menunjukkan bahwa bahkan perbedaan antara identitas partikular seperti identitas budaya lokal dan agama dengan identitas universal bukan tidak mungkin terjadi suatu titik temu. Dengan optimistis Laclau menunjukkan bahwa tercapainya titik temu partikularitas dan universalitas seperti ini merupakan suatu capaian demokrasi yang lebih tinggi".[26]

Sementara itu, terkait agama yang dapat menjadi faktor penting untuk memperkuat identitas politik dan kultural, Scott Appleby menunjukkan adanya dua dimensi agama. Yaitu bahwa "agama bisa menjadi faktor dalam konflik dan kekerasan namun juga bisa menjadi faktor bagi transformasi konflik dan kekerasan menjadi perdamaian dan rekonsiliasi".[27] Argumen yang disampaikan Appleby antara lain adalah bahwa di kalanganpemimpin dan pemikir agama itu sendiri perbedaan pandangan dan pendapat terus terpelihara sehingga gagasan-gagasan mengenai peran agama sebagai faktor transformasi akan terus lestari. Disamping itu, gerakan agama di beberapa tempat kenyataannya juga diinisiasi oleh LSM selain para pemimpin agama, terutama terkait gerakan hak-hak perempuan, hak asasi manusia, dan termasuk hak-hak budaya lokal di dalam kelompok agama itu sendiri. Pada kondisi seperti inilah agama menjadi faktor dalam mewujudkan rekonsiliasi dan perdamaian.[28]

Amy Gutmann mengatakan:

"Identitas yang berbasis agama tidak selalu bertentangan dengan demokrasi. Keduanya setidaknya bertemu dalam komitmen penghargaan terhadap individu. Baik agama maupun demokrasi memiliki komitmen penghormatan terhadap individu sehingga memungkinkan terjadinya titik temu keduanya.[29] Dari sini Gutmann membangun optimisme bahwa pertemuan dua dasar ini justru akan memperkokoh terbangunnya keadilan dan jaminan individu yang lebih kokoh. Kritik sebagian orang bahwa agama cenderung akan membangun tirani, oleh Gutmann dijawab bahwa tidak hanya agama yang berpotensi

---

26 Ernesto Laclau, "Introduction" dalam *The Making of Political Identities*, (New York: Verso, 1994), 1-5.

27 R. Scott Appleby, *The Ambivalence of the Sacred, Religion, Violence, and Reconciliation,* (New York: Rowman & Little eld Publishers Inc., 2000), 281-307.

28 R. Scott Appleby, The Ambivalence, 281-307.

29 Amy Gutmann, *Identity in Democracy*, (New Jersey: Princeton University Press, 2003), khususnya 207-210.

membangun tirani, melainkan seluruh budaya, kepercayaan, dan sistem dalam identitas memiliki potensi yang sama ketika tidak memberi penghargaan kepada individu". [30]

Kesimpulan yang dapat dipetik dari uraian di atas adalah bahwa dalam kondisi konflik dan kekerasan antara minoritas dan mayoritas dimana perbedaan identitas baik kultural maupun agama menjadi penyebabnya, sangat mungkin untuk menegosiasikan dan merekonsiliasikan kepentingan budaya, agama, dan politik hingga terealisir titik temu identitas untuk mewujudkan perdamaian. Dalam konteks ini, agama berperan penting dalam memberikan titik temu, terutama saat orang-orang dan pihak-pihak dalam agama tersebut melakukan upaya-upaya untuk itu.

5. Konflik dan Resolusi Konflik

Konflik, menurut definisi lama, adalah bentrokan, friksi, konfrontasi, percekcokan, pergesekan, perpecahan, perselisihan, pertengkaran, pertikaian, sengketa, rivalitas. [31] Definisi ini mengasosiasikan konflik dengan aktifitas yang melibatkan benturan fisik dan kekerasan. Jika tidak ada kekerasan, belum disebut konflik menurut definisi ini. Biasanya, kata "konflik" dibedakan dari kata "damai". Dalam situasi damai, tidak ada konflik. Jika satu situasi disebut konflik, imajinasi kita kemudian mengarah pada perkelahian, kekerasan dan bukan perdamaian.

Literatur studi perdamaian kontemporer mengubah definisi konflik menjadi lebih netral. Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk, dan William Zartman, dalam pengantar buku *The Saga Handbook of Conflict Resolution* misalnya, merujuk Ensiklopedia Webster edisi revisi menyebut konflik sebagai ketidakselarasan antara dua pihak atau lebih karena perbedaan kepentingan, tujuan dan cara mencapai keduanya. Mereka melepaskan makna kekerasan dari kata konflik. Konflik, dari perspektif ini, adalah sesuatu yang alamiah, normal, terjadi di mana-mana dan sulit dihindari oleh umat manusia.[32] Batasan makna yang hamper senada juga dirumuskan oleh Duane Ruth. Menurutny, konflik adalah kondisi yang terjadi ketika dua pihak atau lebih menganggap ada perbedaan posisi yang tidak selaras, tidak cukup sumber dan tindakan salah satu pihak menghalangi, atau mencampuri atau

---

30 Amy Gutmann, *Identity in Democracy*, 183-186.

31 Dandu Sugono, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008) hlm. 260

32 Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk, dan I William Zartman, *The Sage Handbook of Conflist Resolution* (London: SAGE Publication Ltd), 2009, hlm. 3.

dalam beberapa hal membuat tujuan pihak lain kurang berhasil. Dari pengertian konflik tersebut, maka konflik merupakan kondisi yang terjadi akibat perbedaan posisi yang tidak selaras, adanya pihak yang menghalangi serta ikut campur yang mengakibatkan tujuan pihak lain tidak terpenuhi.

Sedangkan Johan Galtung merumuskan konflik dalam satu segitiga, yang disebut *ABC Triangle*. "ABC dalam segitiga konflik Galtung merupakan urutan sebab terjadinya konflik yang terdiri atas *Attitudes* (A), *Behaviour* (B) dan *Contradiction* (C). *Attitude* mencakup asumsi, kognisi dan emosi yang dimiliki satu pihak terhadap pihak lain".[2] "*Attitude* dalam konflik juga berarti adanya penolakan terhadap superioritas pihak lain. Asumsi yang dibangun bisa bersifat positif dan negatif, akan tetapi kecenderungan yang muncul dalam konflik kekerasan adalah menciptakan asumsi negatif terhadap pihak musuh, sebagai akibat dari kemarahan dan kekecewaan. Kemudian *Behaviour* adalah mental, ekspresi verbal atau fisik yang timbul dalam konflik".[33] "indak kekerasan, penghinaan, sikap tidak hormat, kejahatan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia adalah bentuk-bentuk *Behaviour* dalam konflik. Sehingga *Behaviour* adalah bentuk aksi nyata yang ada dalam konflik. Sedangkan *Contradiction* merupakan bagian penting dalam konflik yang menunjukkan adanya perbedaan ataupun kontradiksi tujuan antar pihak yang berkonflik"[34] Kontradiksi menjadi bagian penting mengingat ia dapat mengakibatkan prilaku dan tindakan kekerasan.

Dalam konflik, kelompok solidaritas berperan penting, mengingat konflik dapat melahirkan kelompok solidaritas dan dapat pula sebaliknya.[35] Kelompok solidaritas mampu memobilir kekuatan dan bertarung. Kelompok ini mempunyai sensitivitas yang kuat terhadap hal-hal seperti pemaksaan asimilasi dan integrasi, otoritas pemerintah yang mengancam identitasnya, bila kelompok ini mempunyai rasa kebersamaan yang kuat. [36] Dalam konflik yang terjadi di Thailand Selatan, pihak separatis Muslim memainkan peran sebagai kelompok solidaritas penentang otoritas pemerintah Thailand di tanah yang mereka diami, yakni Thailand Selatan.

33 Anna, "Applying The ABC", 6

34 Ramsbotham, Miall & Woodhouse, *Contemporary Conflict Resolution*, 19

35 Randall Collins, "C-Escalation and D-Escalation: A Theory of the Time-Dynamics of Conflict", *American Sociological Review*, (2011), 2, http://www.asanet.org/images/journals/docs/pdf/asr/Feb12ASRFeature.pdf (Diakses pada 15 April 2014)

36 Collins, "C-Escalation and D-Escalation", 2

Galtung menilai bahwa "konflik adalah proses yang dinamis, karena struktur, sikap dan perilaku dapat berubah dan saling mempengaruhi satu sama lain".[37] "Kemunculan konflik mengarah pada perubahan sosial dan pada proses kekerasan maupun tanpa kekerasan. Laporan ini berpijak pada definisi tersebut. Karena itu, tidak ada cara lain kecuali menghadapi dan mencarikan jalan keluar". Kata Johan Galtung, "jika kamu tidak suka dengan kekerasan maka cari jalan keluar dari sebuah konflik."[38]

Diperlukan kemampuan memilih model dan strategi penyelesaian konflik sosial yang tepat, mengingat perbedaan sistem sosial di suatu kawasan berbeda dengan di kawasan lainnya. Karena itu solusi konflik tidak dapat "generik", artinya sebuah rumusan yang tepat untuk suatu sistem sosial tertentu belum tentu tepat sistem sosial komunitas lain.

> "Resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunuan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegoisasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya".[39]

Pada dasarnya setiap pendekatan yang ada dalam sebuah penyelesaian masalah, pasti menuai kritik dari beberapa pihak. Hal ini juga terjadi pada penerapan pendekatan *peace keeping, peace making, peace building* dan *peace settlement.* Beberapa kritik ini dikemukakan oleh Miall et al. dan Pattison.[40] Miall et al. dalam artikelnya menyebutkan setidaknya terdapat enam kritikan yang diajukan untuk mempertanyakan efektifitas dari upaya-upaya resolusi

---

37 Collins, "C-Escalation and D-Escalation", 20

38 Lihat "Breaking the Cycle of Violent Conflict with Johan Galtung," University of California Television (UCTV), 9 Desember 2010, http://www.youtube.com/watch?v=16YiLqftppo, diunduh pada 29 September 2013.

39 Ahmad Rajafi, Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Local Wisdom, *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam,* vol.7, no.1, Juni 2016.

40 Pattison, James (2008). Whose Responsibility to Protect? The Duties of Humanitarian Intervention [online] dalam philpapers.org/word hlm 1-30 (diakses 4 April 2016).

konflik di atas. Keenam kritik tersebut di antaranya: (1) perlu adanya deferensiasi dalam hal aplikasi dan agensi dalam *peace building*; (2) terdapat beberapa kemerosotan aspek yang berbeda akibat adanya konflik, (3) adanya waktu yang sempit, bahwa misi yang dibawa cenderung memicu pada arena konflik; (4) mempertanyakan tujuan dari intervensi yang dilakukan; (5) adanya adopsi dari sistem barat terkait pengimplementasiannya dalam pembangunan perdamaian masih memiliki ketidakcocokan dengan kebudayaan atau local wisdom dari negara yang diintervensi; (6) berhubungan dengan adanya penggunaan *millitary force* dalam *peace keeping* yang pada dasarnya tidak mencerminkan perdamaian itu sendiri.[41] Sedangkan tiga kritik yang disampaikan oleh Pattison di antaranya: (1) *ineffective norm*, yakni belum adanya norma yang melegalkan pengintervensi dalam menjalankan tugasnya; (2) *who decides effectiveness*, yakni adanya perbedaan penilaian terkait siapa pihak pengintervensi yang paling efektif; dan yang terakhir (3) *fairness* dan *effectiveness*, yakni terkait peringkat agen-agen yang paling efektif dalam menjalankan intervensi. Seluruh pendekatan ini melibatkan banyak aktor dengan tujuan agar penyelesaian permasalahan dapat segera di temukan dan mampu mencapai cara yang efisien dan efektif. Penerapan keempat pendekatan ini pernah diterapkan dalam penyelesaian konfik Afghanstan, meskipun di lain sisi masih terdapat beberapa kritik dari beberapa tokoh. Kritikan tersebut di antaranya adalah permasalahan mengenai efektifitas dan efisiensi serta bagaimana seorang aktor yang melakukan upaya *peace keeping* mampu mendapatkan legalitas dalam upaya intervensi yang dilakukan terhadap negara yang tengah berkonflik.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Studi dan kajian terkait konflik di Thailand Selatan telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. *Pertama,* dilakukan Thanet Aphornasuvan, "*Nation-State and the Muslim Identity in the Southern Unrest and Violence*"[42] yang memfokuskan pada akar penyebab konflik dan kekerasan di Thailand Selatan. Kebijakan Kerajaan Thai/Siam membangun nasionalisme modern Thailand dalam bentuk *nation-state* dengan memaksakan identitas dan integrasi

41 Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse & Hugh Miall, *Contemporary Conflict Resolution;the Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts,* (UK: Cambridge Politic Press, 1998).

42 Aphornasuvan, Thanet, "Nation-State and the Muslim Identity in the Southern Unrest and Violence," dalam Imtiyaz Yusuf dan Lars Peter Schmidt, eds. *Understanding Conflict and Approaching Peace in Southern Thailand*, Bangkok: KAS, 2006.

nasional yang mencakup bahasa, budaya dan nilai-nilai budaya Thai kepada Melayu Muslim telah menyebabkan benturan budaya dan menimbulkan resistensi yang sangat kuat dan pada gilirannya mengakibatkan kekerasan.

Kedua, dilakukan oleh W.K. Che Man, *Muslim Separatism: Moro of Southern Philippines and the Malays of Southern Thailand.*[43] Kajian ini membahas tentang permasalahan yang relative sama yang dihadapi oleh minoritas Muslim di Philipina Selatan dan Thailand Selatan. Keduanya adalah minoritas Muslim yang berada di kalangan mayoritas non-Muslim. Problem yang dihadapi keduanya adalah bagaimana kelompok minoritas dapat secara damai hidup berdampingan di negara yang sama dengan warga non-Muslim. Mereka mengalami dilema terkait bagaimana merekonsiliasikan kepercayaan Islam fundamentalnya dengan pentingnya menjadi *full citizenship* (warga negara yang baik) di negara mayoritas non-Muslim.

Ketiga, dilakukan oleh Neil J. Melvin, *Conflict in Southern Thailand: Islamism, Violence and the State in the Patani Insurgency.*[44] Studi ini lebih fokus pada eskalasi tingkat kekerasan sebagai dampak konflik di Thailand Selatan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Melvin melihat eskalasi tersebut disebabkan oleh kesenjangan kepentingan politik, kesenjangan ekonomi dan kesenjangan peran politik antara minoritas Muslim dan mayoritas non Muslim. Selain itu, ia juga melihat bahwa ada pengaruh gerakan jihad Islam yang bersifat transnasional dalam eskalasi konflik di Thailand Selatan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh John Funston, *Malaysia and Thailand's Southern Conflict; Reconciling Security and Ethnicity,*[45] yang lebih memfokuskan pada sikap dan pendekatan Malaysia dalam menjaga hubungannya dengan Thailand Selatan yang mengalami konflik. Mengingat kedua wilayah ini berbatasan secara geografis dan memiliki hubungan kultural dan keserumpunan. Selain itu, juga terdapat penelitian Chandra-nuj Mahakanjana dengan judul "*Decentralization, Local Government, and Socio-Political Conflict in Southern Thailand*",[46] yang melihat kebijakan

---

43 Che Man, W.K. *Muslim Separatism: Moro of Southern Philippines and the Malays of Southern Thailand*, Manila: Ateneo de Manila University Press, 1990.

44 Melvin, Neil J., *Conflict in Southern Thailand: Islamism, Violence and the State in the Patani Insurgency,* (Sweden: Stokholm International Peace Research Institute, 2007).

45 Funston, John, *Malaysia and Thailand's Southern Conflict; Reconciling Security and Ethnicity*, Contemporary Souteast Asia, A journal of International and Strategic Affairs, Vol. 32, Number 2, August 2010.

46 Mahakanjana, Chandra-nuj, *Decentralization, Local Government, and Socio-Political Conflict in Southern Thailand*, East-West Center Washington Working Papers, Washington, No. 5,

desentralisasi dan pemberian peran pada pemerintah lokal sebagai angin segar dalam upaya penyelesaian konflik

Penelitian dan kajian sebagaimana dijelaskan di atas memiliki titik fokus yang berbeda-beda termasuk juga dengan fokus penelitian ini yang lebih melihat pada peran akademisi, professional dan LSM dalam upaya mencari solusi konflik bagi minoritas Muslim Thailand dalam berhadapan dengan pemerintah dan mayoritas di Thailand. Selain itu juga memfokuskan pada bagaimana mereka membangun konsep harmonisasi kultural, termasuk agama, serta merekonsiliasikan kepentingan antara minoritas Muslim dan warga mayoritas non-Muslim serta pemerintah pusat, dan antar mereka sendiri.

Agustus 2006.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan kombinasi antara pendekatan dan metode penelitian sejarah[47] dan pendekatan sosiologi politik. Dengan menggunakan studi perbandingan antara beberapa tulisan sejarah dan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode sejarah, peneliti berharap dapat mengungkap dan menggambarkan bagaimana dinamika, transformasi, dan diskontinuitas dalam gerak perkembangan dan pergulatan minoritas Muslim Thailand dalam upaya mencari solusi konflik yang berkepanjangan. Karena itu diperlukan gambaran menyeluruh tentang data, fakta dan peristiwa sebenarnya mengenai objek penelitian ini. Untuk itu, sumber-sumber tertulis seperti regulasi/ kebijakan, pidato perdana menteri dan tokoh, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang ditulis oleh penulis sejarah yang sezaman, ditulis oleh orang yang terlibat dan atau menyaksikan peristiwa yang menjadi objek penelitian ini merupakan faktor yang sangat penting. Dalam menganalisis teks-teks yang menjadi sumber rujukan, digunakan pendekatan *content analysis.*

Selain itu, pengumpulan dan analisis data juga menggunakan pendekatan sosiologi politik.[48] Dengan pendekatan ini akan dikumpulkan data terkait kebijakan pemerintah di satu sisi, dan pandangan dari masing-masing kelompok dan perorangan dalam kelompok minoritas Muslim serta relasi antar mereka, masalahnya serta tantangan yang mereka alami akibat konflik yang disertai kekerasan yang berkepanjangan antara komunitas Muslim di Thailand Selatan dengan pemerintah pusat. Selain itu, juga diarahkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang

---

47 Tentang metode penelitian sejarah, lihat John Tosh, *The Pursuit of History: Aims, Methodes and Directions in the Study of Modern History* (London and New York: Longman, 1986); Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta:UI Press, 1985); Kuntowijoyo, *Metodology Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994); Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah,* (Yogyakarta: Bentang, 1995), hlm. 89-122; dan Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodelogi Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,1993).

48 Istilah sosiologi politik berasal dari dua kata, yaitu sosiologi dan politik. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, kelompok-kelompok sosial, dan tingkah laku individu baik individual maupun kolektif dalam konteks sosial. Politik atau ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan sebagai konsep inti. Konsep-konsep lain sebagai objek studi politik adalah negara, pengambilan keputusan kebijaksanaan, distribusi dan alokasi.

peran dan upaya akademisi, profesional dan LSM dalam membangun konsep harmonisasi kultural, termasuk agama, serta merekonsiliasikan kepentingan antara minoritas Muslim dan warga mayoritas non-Muslim serta pemerintah pusat, dan antar mereka sendiri.

Seluruh data yang terhimpun itu dikaji, dianalisis dan diinterpretasi, untuk diartikulasikan dalam konstruksi pembahasan yang sistematis, logis dan komprehensif. Agar tidak terjebak pada pembahasan yang bersifat naratif dan konvensional –seperti yang selalu terjadi pada penulisan sejarah, penelitian ini juga berusaha menjelaskan faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari peristiwa yang menjadi objek penelitian. Karena itu, konstruksi pembahasan cenderung menggabungkan pendekatan diakronik dan sinkronik, dalam arti bahwa peneliti tidak hanya menyelidiki dan membahas tentang proses-proses perubahan dalam setting waktu yang menghasilkan apa yang oleh Braudel disebut sebagai 'sejarah peristiwa-peristiwa' tetapi juga melihat struktur-struktur tetap tanpa memperdulikan unsur waktu (*timelesss*) sehingga menghasilkan generalisasi-generalisasi yang bersifat makro.

Dalam usaha menempatkan kondisi-kondisi sinkronik dalam sebuah konteks diakronik, susunan penulisan studi ini akan didasarkan pada kronologi. Namun, untuk menghadirkan suatu pendekatan interaktif, metode kronologis ini akan dikombinasikan dengan penyusunan penulisan secara tematik.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Negara Thailand, tepatnya Thailand Selatan

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

a. Observasi adalah tehnik dimana data dikumpulkan dengan cara melakukan pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang ada pada lokasi penelitian. Dengan teknik ini diharapkan ada gambaran yang menyeluruh dan lebih lengkap terkait obyek penelitian.

b. Wawancara Mendalam *(in depth interview*) adalah teknik dimana data dikumpulkan melalui tanya jawab langsung secara lisan mengenai obyek penelitian. I*nterview guide* menjadi panduan pertanyaan tentang obyek penelitian.

c. Dokumentasi adalah teknik dimana data dikumpulkan dengan cara menelaah dokumen, referensi, maupun arsip yang relevan dengan pokok pembahasan penelitian.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara secara langsung dengan informan dan dari sumber-sumber tertulis seperti regulasi, kebijakan, pidato perdana menteri, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang ditulis oleh penulis yang sezaman atau oleh orang yang terlibat dan atau menyaksikan peristiwa yang menjadi objek penelitian ini. Sedangkan data sekunder adalah yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Pusat Biro Statistik, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

4. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak bisa hanya dilakukan secara linear, tetapi harus menggunakan analisis interaktif (*interactive analysis*). Dalam metode ini, model ini disebut juga dengan model interaktif secara siklus (*syclycal interactive analysis model*). Komponen dari analisis tersebut adalah reduksi data, sajian data, penarikan simpulan.

Setelah seluruh data yang terhimpun itu dikaji, dianalisis dan diinterpretasi, untuk diartikulasikan dalam konstruksi pembahasan yang sistematis, logis dan komprehensif. Agar tidak terjebak pada pembahasan yang bersifat naratif dan konvensional –seperti yang selalu terjadi pada penulisan sejarah, penelitian ini juga berusaha menjelaskan faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari peristiwa yang menjadi objek penelitian. Karena itu, konstruksi pembahasan cenderung menggabungkan pendekatan diakronik dan sinkronik, dalam arti bahwa peneliti tidak hanya menyelidiki dan membahas tentang proses-proses perubahan dalam setting waktu yang menghasilkan apa yang oleh Braudel disebut sebagai 'sejarah peristiwa-peristiwa' tetapi juga melihat struktur-struktur tetap tanpa memperdulikan unsur waktu (*timelesss*) sehingga menghasilkan generalisasi-generalisasi yang bersifat makro.

BAB IV
AKADEMISI, TOKOH AGAMA & LSM DALAM UPAYA RESOLUSI KONFLIK

Pada tahun 2004 konflik di Thailand Selatan[49] (provinsi Pattani, Yala, dan Narathiwat) meningkat menjadi kekerasan yang ekstrim. Tiga insiden kekerasan besar yang terjadi pada tahun 2004 adalah serangan kamp militer di Narathiwat pada 4 Januari, serangan di Masjid Se Krue pada tanggal 27 April dan Tragedi Tak Bai pada 25 Oktober.[50] Ada 9.446 insiden kekerasan sejak pemberontakan berkobar pada bulan Januari 2004 sampai Januari 2010, yang mengakibatkan 4.100 kematian dan 6.509 korban luka.[51]

Kekerasan fisik dan insiden pengeboman sampai penelitian ini dilakukan masih belum berakhir. Saat pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan, letusan bom tidak jarang terjadi, dan meningkat intensitasnya pada bulan Juni dan Juli. Salah satu sumber menyebutkan bahwa peningkatan tersebut berkaitan dengan bargaining anggaran. Intensitas bom menunjukkan bahwa situasi dan kondisi Thailand Selatan tidak aman, karena itu memerlukan pasukan keamanan untuk terus mengamankannya dan konsekuensinya memerlukan anggaran yang tinggi. Sumber lainnya juga menyebutkan bahwa pihak militer memiliki kepentingan untuk terus bertugas di wilayah selatan. Karena dengan bertugas di wilayah konflik semacam ini memberikan kepada mereka peluang untuk promosi jabatan lebih cepat dan memperoleh insentif yang lebih besar.

Konflik di Thailand Selatan ini hakekatnya adalah antara etnonasionalis etnis Muslim dan pemerintah pusat. Hal ini karena perbedaan pandangan terkait kebijakan pemerintah di Thailand Selatan. Lebih jelasnya ada sejumlah faktor yang menyebabkan adanya gerakan etnonasionalisme ini.

---

49 Thailand Selatan terdiri dari 5 provinsi perbatasan: Songkhla, Satun, Pattani, Yala, dan Narathiwat. Sebagian besar penduduk adalah Muslim Melayu dan berbahasa Melayu atau Jawi; namun; provinsi Songkhla dan Satun memiliki campuran etnis Thai dan Melayu dan didominasi oleh yang berbahasa Thai. Lihat Colonel Patcharawat Thnaprarnsing, *Solving the Conflict in Southern Thailand,* (USAWC Strategy Research Project, 2009), hlm. 9

50 Kayanee Chor Boonpunth, *An Analysis of the Role of Civil Society in Building Peace in Ethno-Religious Conflict,* paper presented at the PSA 64th Annual International Conference 14-16 April 2014, Manchester UK, hlm. 3.

51 Srisompob Jitpiromomsri, "*The Southern Thai Conflict Six Years On: Insurgency, Not Just Crime*", Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, Published by Institute of Southeast Asian Studies, Volume 32, Number 2, August 2010, hlm. 157; Brain Mc Cartan and Shawn W Crispin, "An Atol Investigation, Southern Test for New Thai Leader", http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/JL2Aeo2.html (accessed December 23, 2008).

Thnaprarnsing menyebut "faktor sejarah, faktor sosial-ekonomi dan faktor budaya sebagai latar belakang konflik.

Akar penyebab konflik berasal dari banyak faktor terkait, dan tujuan utama para pemberontak dalam konflik tersebut adalah pemisahan Selatan dari seluruh negeri. Dampak konflik ini dirasakan oleh seluruh bagian masyarakat Thailand, termasuk orang tak berdosa, dan ini menjadi masalah keamanan prioritas tinggi bagi Thailand dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Konflik dan kekerasan ini harus diselesaikan dalam jangka pendek, sebelum meningkat menjadi perang berlarut-larut bahkan lebih keras.

Penyelesaian konflik dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang damai. "Kedamaian" bermakna bukan hanya absennya kekerasan struktural, tetapi juga terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial. "Perdamaian" merupakan pencapaian kualitas kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi tata nilai (*value system*) yang berlaku umum dalam masyarakat. Perdamaian dalam konsep ini meliputi semua aspek tentang masyarakat yang baik, seperti: terpenuhinya hak asasi yang bersifat universal, stabilitas sosial-politik, supremasi hukum, kesejahteraan ekonomi, keseimbangan ekologi dan nilai-nilai pokok lainnya

Dalam pengertian di atas, konsep perdamaian memiliki dua lingkup makna. *Pertama,* steril dari kekerasan fisik. Dalam hal ini, pemerintah dan negaralah yang diharapkan paling bertanggung jawab dan memainkan peran paling penting untuk mewujudkannya dengan menghentikan kekerasan fisik dan menandatangani perjanjian gencatan senjata. *Kedua,* damai dalam arti terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dalam masyarakat, yaitu terpenuhinya hak asasi yang bersifat universal, stabilitas sosial dan politik, supremasi hukum, kesejahteraan ekonomi, keseimbangan ekologi, keleluasaan dalam pengembangan budaya dan pengamalan agama, dan nilai-nilai pokok lainnya. Dalam hal ini, selain pemerintah, keterlibatan dan peran masyarakat sipil menjadi penting dalam menciptakan budaya damai dan meningkatkan keadilan sosial di daerah konflik. Di mana negara telah gagal dalam menangani konflik, masyarakat sipil dipandang sebagai pihak yang diperlukan untuk mengurangi kekerasan dan membangun perdamaian yang berkelanjutan.

Lebih jauh, menurut kerangka kerja untuk resolusi konflik, untuk kasus Thailand, banyak yang memandang bahwa kebijakan negara saja tidak bisa menyelesaikan konflik yang terjadi yang memfokuskan terutama pada strategi "menjaga perdamaian" dengan meningkatkan jumlah pasukan keamanan dan mengejar "perdamaian" melalui pembicaraan damai. Namun, untuk menciptakan perdamaian abadi di wilayah ini, masyarakat

sipil perlu dilibatkan dalam strategi "perdamaian" untuk menjaga keseimbangan struktur sosial-ekonomi dan mencegah kekerasan terjadi lagi. Penyelesaian masalah konflik dan upaya mewujudkan perdamaian yang hakiki merupakan proses panjang dan tidak mengenal kata henti. Semua ini tergantung pada komitmen, upaya dan kesungguhan bersama masyarakat sipil dalam mewujudkannya selain pihak pemerintah

Selama ini kebijakan pemerintah Thailand lebih memfokuskan terutama pada masalah keamanan, terutama meningkatkan kekuatan pasukan, menerapkan hukum dan reorganisasi lembaga pemerintah. Kebijakan ini bisa mengurangi kekerasan selama beberapa waktu, tetapi ketegangan dan akar penyebab konflik masih belum terselesaikan, mengingat konflik ini telah terjadi dalam waktu yang relatif panjang dan berdampak luas dalam masyarakat berupa kesenjangan sosial, ketertinggalan dalam bidang pendidikan, ekonomi, infrastruktur, sarana dan prasarana layanan publik dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah saja tidak bisa menyelesaikan masalah. Dengan demikian, masyarakat sipil diperlukan untuk terlibat dalam membangun perdamaian di kawasan itu.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat alternatif lain yang sangat potensial dalam penyelesaian konflik dan mewujudkan kehidupan yang damai, yaitu berupa peran dan aksi nyata yang dilakukan oleh masyarakat sipil yang ditunjukkan oleh para akademisi, ptofesional, tokoh agama dan LSM.

B. Latar Belakang Konflik

Thailand adalah negara mayoritas Thai yang menganut agama Budha. Jumlah mereka mencapai sekitar 80% dari seluruh jumlah penduduk. Sementara itu, Muslim di Thailand berjumlah sekitar 15 persen, karena itu mereka adalah minoritas. Menurut Don Pathan, Direktur Hubungan Luar Negeri Forum Patani— Minoritas Muslim Melayu, secara geografis terkonsentrasi di tiga provinsi paling Selatan, tepatnya di Provinsi Pattani, Yala, Narathiwat dan 4 (empat) kabupaten di Provinsi Songhkla. Total populasi di Thailand Selatan berjumlah sekitar 2 juta orang, di antaranya lebih dari 1,5 juta adalah Melayu Muslim.[52] Mereka tinggal di wilayah Selatan dan jumlahnya kira-kira 80% dari jumlah populasi yang diam di sana.[53]

Melayu Muslim Thailand tidak hanya berbeda secara letak geografis dengan warga Thailand lainnya, tetapi juga berbeda dalam hal agama dan

52 Don Pathan, *Conflict Management and Resolution in Asia: The Role of Civil Societies in Thailand's Deep South,* (The Asia Foundation, Occasional paper, 18 Oktober 2012), hlm. 1

53 Mc Carrgo: 2010), hm. 1

budaya. Sebagian besar Muslim di Thailand Selatan memiliki karakteristik yang sama dengan Muslim di Malaysia. Kondisi ini menyebabkan perbedaan kehidupan sosial-budaya antara Muslim Thailand Selatan dengan mayoritas warga di wilayah lain. Muslim Melayu tidak hanya berbeda agama, tapi juga bahasa, tulisan, dan budaya dengan mayoritas etnis Thai.

Songkhla merupakan provinsi terbesar di Thailand Selatan, berperan sebagai pusat dagang di Selatan dan mempunyai bandara internasional. Mayoritas Thai Budhis tinggal di wilayah kota. Di Selatan, mereka tergolong kelas ekonomi menengah meskipun tergolong minoritas, dan banyak yang bekerja sebagai pengusaha dan pegawai pemerintah.

Thailand Selatan dimana mayoritas Muslim tinggal terdiri dari Provinsi Pattani, Narathiwat, Yala, dan Songhkla secara historis adalah bekas wilayah kekuasaan Kesultanan Patani. Sejak 1906, seiring dengan dengan perjanjian (*Anglo-Siam Treatment),* Inggris dan Siam berkuasa terhadap negeri-negeri Melayu di Utara. Sementara Pattani, Yala Narathiwat, Satun dan Songkhla digabungkan oleh Siam ke bawah wilayah kekuasaan Thailand, Kedah, Perlis, Terengganu dan Kelantan, digabungkan oleh Inggris menjadi bagian wilayah kekuasaan Malaysia.

Kesultanan Patani semula adalah Kerajaan Melayu yang berdaulat berpenduduk mayoritas etni Melayu Muslim. Kesultanan ini dipandang sebagai kesultanan penting yang menyebarkan agama Islam. Patani menjadi centra perdagangan Islam yang kuat berpengaruh di perairan Laut Cina Selatan, mengingat posisinya sebagai kota pelabuhan satu-satunya. Hal ini menyebabkan kesultanan ini dipandang sebagai simbol kejayaan Muslim Melayu pada eranya. Di samping itu, kesultanan ini kaya dengan sumber daya alam seperti emas, timah, sutra, kapur barus, lada, gaharu, serta emboni. Terdapat sejumlah warga negara asing yang datang melancong ke Patani dan melakukan perdagangan. Keberadaan Kesultanan Patani sangat diperhitungkan, mengingat ia terkenal dengan kekayaan sumber daya alam, dan pengaruhnya dalam aspek perdagangan.

Posisinya yang strategis disertai sumber daya alam yang melimpah, serta mempunyai pelabuhan penting yang terhubung ke perairan Laut Cina Selatan, menyebabkannya sejak lama diincar Kerajaan Siam (sekarang menjadi Thailand) yang ingin menguasai kesultanan ini melalui ekspansi wilayah dan kerajaan.[54] Kerajaan Siam bekerjasama dengan kekuasaan Inggris berhasil melakukan penaklukkan terhadap Kesultanan Patani. Pada

---

54 Kayanee Chor Boonpunth, *An Analysis of the Role of Civil Society in Building Peace in Ethno-Religious Conflict: A CaseStudy of theThree Southernmost Provinces of Thailand,* Paper prented at the PSA 64th Annual International Conference, Manchester, UK, April 2014.

tahun 1909 Inggris menyerahkan wilayah Kesultanan Patani ke Kerajaan Siam melalui perjanjian "*Anglo-Siam Treatment*" di Bangkok.[55]

Anglo-Siam Treatment menegaskan berakhirnya kekuasaan Kesultanan Pattani dan secara sah menjadikannya sebagai wilayah kekuasaan Siam. Wilayah Kesultanan Patani tersebut mencakup "Patani, Teluban (sekarang Narathiwat), Jalor (sekarang Yala), dan sebagian wilayah Senggora (sekarang dikenal dengan nama Songkhla)". Penaklukan Siam terhadap Kesultanan Pattani meniscayakan penduduknya untuk tunduk pada seluruh regulasi yang ditetapkan oleh Siam dan merobah secara resmi identitas mereka dari warga Kesultanan Patani menjadi warga Kerajaan Siam atau yang saat ini disebut dengan nama Thailand.

Perjanjian *Anglo Siam Treatment* menimbulkan ketidakpuasan Melayu Muslim dan masalah bagi mereka, mengingat mereka harus menyesuaikan diri dengan situasi dan aturan dan kultur yang baru. Sistem hidup dan budaya mayoritas warga Thailand yang menganut Budha berbeda sekali dengan Melayu Muslim yang biasa hidup dalam budaya dan aturan yang dipandu ajaran Islam dan budaya Melayu. Perbedaan itu terdiri dari cara hidup, keyakinan agama, cara, hingga perbedaan dalam bermasyarakat. Karena itu, mereka lebih memilih bergabung menjadi warga negara Malaysia yang mayoritas Muslim, dari pada menjadi minoritas Muslim di Kerajaan Siam. Permasalahan lainnya adalah terkait dengan ketimpangan di bidang ekonomi, pendidikan, dan masalah-masalah sosial-politik. Permasalahan ini semakin melebar dan memunculkan reaksi protes yang berimplikasi pada gerakan etnonasionalisme dan tindakan kekerasan oleh Melayu Muslim.

Sejak pergantian abad ke-20, pemerintah Thailand menerapkan kebijakan yang dimaksudkan untuk mengasimilasi provinsi Melayu-Muslim ke dalam tubuh geo-politik Thai yang lebih luas. Kebijakan dan upaya ini mendapat penolakan dari Melayu setempat karena mereka merasa bahwa budaya dan identitas agama mereka dipertaruhkan. Seperti juga orang Thailand, Melayu Patani sangat bangga dengan lembaga, cara hidup, dan tempat tinggal mereka di wilayah berbahasa Melayu. Asimilasi budaya berarti "proses pengadopsian suatu budaya akan budaya lain secara spesifik yang berakibat pada memudarnya nilai-nilai budaya asli. Kebijakan asimilasi ini juga mencakup hal – hal mendasar seperti nama seseorang. Etnis Muslim Melayu dihimbau untuk mengganti nama mereka menjadi nama yang sesuai dengan etnis Thai. Nama – nama yang mengandung

55 Colonel Patcharawat Thnaprarnsing, *Solving the Conflict in Southern Thailand,* (USAWC Strategy Research Project, 2009), hlm. 3

unsur Muslim atau Melayu tidak diperkenankan penggunaannya". Warga Melayu yang tidak taat pada regulasi tersebut atau tetap menggunakan nama Melayunya sulit untuk memperoleh promosi jabatan bahkan bisa tidak memperoleh peluang kerja.

Ketegangan antara Muslim di Thailand Selatan dan pemerintah pusat di Bangkok terus terjadi dan intensif setelah negara berusaha memodernisasi diri. Kebijakan nasionalisasi ekstrim pemerintahan Phibulsongkhram menyebabkan gerakan rakyat Patani terbentuk untuk menolak kebijakan ini yang dianggap sebagai upaya negara untuk menghancurkan identitas Muslimnya. Pada akhir 1960-an, keluhan ini diterjemahkan ke dalam perlawanan bersenjata terorganisir dan pembentukan gerakan separatis yaitu, Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP) pada tahun 1959, Barisan Revolusi Nasional (BRN) pada tahun 1963 dan *Patani United Liberation Organization* (PULO) pada tahun 1968. Kelompok-kelompok ini disebut kelompok separatis karena komitmen mereka pada awalnya adalah untuk mendirikan negara Islam independen. Namun, tampaknya tujuan dari kelompok pemberontak saat ini telah berubah ke tuntutan otonomi dan keadilan daripada tuntutan kemerdekaan.

Resistensi terhadap asimilasi telah mengambil berbagai bentuk dan sebagian didasarkan pada alasan etno-religius, tetapi sebagian pada narasi sejarah-budaya yang melihat klaim negara Thailand sebagai ungkapan dari okupasi dan penjajahan pada abad lalu oleh kekuatan Siam. Isu-isu ini selanjutnya bertambah luas dan menyebabkan gerakan protes yang berimplikasi pada gerakan etnonasionalisme Muslim Melayu dan tindakan kekerasan. Sejak saat itu, kerusuhan dan aksi kekerasan kerap terjadi yang menyebabkan kerugian materil dan tidak jarang menghilangkan nyawa orang yang tak berdosa.

Separatisme bersenjata memuncak di tahun 1970 dan awal 1980-an, dan secara finansial didukung oleh beberapa pemerintah di Timur Tengah yang juga memberikan pelatihan militer, dan perlindungan untuk mendorong diaspora Patani Melayu. Pada saat itu, kelompok-kelompok seperti PULO dan BNPP telah mendirikan kantor di berbagai negara Muslim di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Semangat revolusioner ini reda di akhir 1980-an dan awal 1990-an. Kekerasan menurun secara dramatis. Ini antara lain karena pendekatan baru pemerintah yang efektif dalam mengurangi kekerasan dengan menekankan partisipasi masyarakat serta pembangunan sosial dan ekonomi dari pada strategi militer murni.[56]

56 Isara News Centre, http://isranews.org/south-news/stat-history/item/26389-10subjects.html, diakses pada 4 Maret 2015.

Faktor penyebab lainnya disinyalir karena perbedaan yang muncul antara pimpinan gerilyawan di wilayah tersebut dan para pemimpin berbasis di luar negeri. Karena perbedaan yang belum terselesaikan ini, banyak militan meninggalkan pemberontakan bersenjata dan kembali ke kehidupan pedesaan yang normal di provinsi-provinsi. Meski begitu, kebencian terhadap regulasi pemerintah terkait asimilasi dan identitas nasional yang dipaksakan tidak sepenuhnya terkikis.[57]

Dekade berikutnya memperlihatkan perkembangan yang besar di wilayah ini. Sebuah lembaga/agen multi-sektoral yang dipimpin warga sipil, Pusat Administrasi Provinsi Perbatasan Selatan (*Southern Border Provinces Administrative Cente* disingkat SBPAC) didirikan pada tahun 1980-an untuk mengelola wilayah tersebut. SBPAC mempertimbangkan budaya dan kebutuhan khusus daerah dengan cara dimana instansi pemerintah Thailand sebelumnya telah gagal melakukannya. Ia menghasilkan beberapa tingkat kemauan baik dari penduduk setempat. Selama hampir satu dekade wilayah itu damai, atau paling tidak tampak begitu. Negara salah mengasumsikan tidak adanya kekerasan berarti telah tercipta perdamaian. Faktanya sebuah generasi baru sedang dipersiapkan dan keluhan lama akan menciptakan generasi baru yang militan yang akan muncul kembali kurang dari satu dekade kemudian.[58]

Pada awal 1980-an hingga akhir 1990-an, kekerasan di wilayah selatan menurun secara dramatis. Ini terutama karena pendekatan baru pemerintah yang efektif dalam mengurangi kekerasan dengan menekankan partisipasi masyarakat serta pembangunan sosial dan ekonomi dari pada strategi militer murni.[59] Namun, kekerasan di Selatan meningkat secara dramatis setelah Thaksin Shinawatra menjadi Perdana Menteri. Pendekatan keamanan garis keras dan kebijakan administrasinya banyak dikriktik.[60]

Thaksin Shinawatra adalah Perdana Menteri pada tahun 2001 hingga 2006. Selama masa pemerintahannya, kepemimpinannya yang keras dan apa yang banyak dilihat orang sebagai kebijakan yang keras, memberikan kondisi kondusif bagi eskalasi kerusuhan. Ketika mengawali pemerintahannya, Thaksin percaya bahwa hanya ada beberapa yang signifikan dari pemberontakan yang tersisa, dan hanya geng kriminal

57 Don Pathan, *Conflict Management and Resolution in Asia: The Role of Civil Societies in Thailand's Deep South,* hlm. 1

58 Ibid., hlm. 1-2.

59 Isara News Centre, http://isranews.org/south-news/stat-history/item/26389-10subjects.html, diakses pada 4 Maret 2015.

60 Pathmanand, U., "Thaksin's Achilles' Heel", in McCargo, D.(ed), *Rethinking Thailand's Southern Violence,* (Singapore: NUS Publishing, 2007), hlm. 70.

yang terlibat dalam kegiatan ilegal di provinsi selatan. Dengan demikian, ia percaya tindakan terbaik adalah membubarkan SBPAC dan CPM-43 dan menyerahkan semua tanggung jawab kepada polisi.Sayangnya, ini menciptakan kekosongan komunikasi antara pemerintah dan umat Islam di wilayah tersebut.

Pemberontakan kembali terjadi pada akhir tahun 2001, tetapi tidak secara resmi diakui. Berikutnya, tingkat kekerasan mendadak naik pada tahun 2004. Tepatnya pada tanggal 4 Januari 2004 puluhan militan menyerang sebuah kamp militer di Narathiwat. Lebih dari 5.000 orang diyakini telah tewas dalam apa yang telah menjadi konflik Asia Tenggara paling berdarah. Sebelum kejadian Januari 2004, pemberontak dicap sebagai "bandit pipit" bekerja untuk tokoh-tokoh yang berpengaruh dan sindikat kejahatan yang menciptakan gangguan politik dan/atau gangguan keuntungan finansial. [61]

Tidak adanya klaim tanggung jawab atas serangan tersebut menyebabkan multitafsir terhadap kekerasan itu, seperti yang terlihat dalam berbagai penjelasan yang disampaikan oleh sarjana Thailand dan sarjana asing, analis keamanan, dan spesialis terorisme. Tapi premis mendasar dari pemberontakan saat ini bukanlah hal yang baru bila mempertimbangkan konteks historis dari konflik tersebut. Sekarang pemerintah Thailand tidak lagi mengatakan "bandit pipit". Sebaliknya, memandang generasi baru pemberontak sebagai jaringan pemuda Muslim yang marah yang diajarkan tentang sejarah yang terdistorsi dan menganut paham Islam yang "salah". Mereka sering juga dituduh sebagai pedagang dan / atau pecandu obat.[62]

Sejak kembalinya kekerasan pada tahun 2004, bentuk-bentuk terjadinya berubah tergantung pada taktik pemerintah dan para pemberontak. Pada awal kebangkitan kekerasan, dari tahun 2004 sampai pertengahan 2007, gelombang kekerasan meningkat pesat dari serangan gerilyawan yang dipicu oleh insiden brutal di Masjid Se Krue dan pembantaian Tak Bai. Pemerintah menangani konflik dengan menggunakan langkah-langkah kontra agresif. Kebijakan nasional mengenai kekerasan di wilayah paling selatan ini tergantung pada pemimpin negara dan keadaan keseluruhan selama waktu itu. Setelah pendekatan tangan besi digunakan oleh pemerintah Thaksin, pemerintah berikutnya nampak menangani konflik dengan cara yang lebih kompromi. Namun, beberapa pemerintah tidak memasukkan upaya apapun untuk memperbaiki situasi kekerasan di provinsi ini karena mereka memiliki masalah yang lebih mendesak untuk diselesaikan, misalnya,

61 Don Pathan, *Conflict Management and Resolution in Asia: The Role of Civil Societies in Thailand's Deep South,* hlm. 1-2.

62 *Ibid.*, hlm. 2

melemahnya ekonomi, krisis politik dan bencana alam.[63]

Militer yang berusaha menahan operasi keamanan dengan proyek berbasis komunitas lokal gagal memenangkan hati dan pikiran warga setempat, membuktikan bahwa niat baik tidak selalu merupakan kebijakan yang tepat, dan bahwa pembangunan belum tentu solusi untuk masalah tersebut. Sayangnya, isu legitimasi negara Thailand di tanah air Melayu Patani yang bersejarah terus diabaikan, serta isu-isu lain, seperti ruang budaya dan kisah sejarah Melayu Patani.[64]

Saat ini, sel-sel militan telah menciptakan sebuah jaringan yang membentang di 3 provinsi paling selatan Narathiwat, Yala, dan Pattani, serta empat kabupaten yang berbahasa Melayu di provinsi Songkhla. Secara signifikan, taktik yang digunakan oleh militan sekarang ini berbeda dari yang dignakan oleh generasi separatis sebelumnya. Generasi baru pejuang ini tidak dibatasi oleh jenis aturan kelembagaan yang mengatur generasi pemberontak sebelumnya. Keputusan untuk menyerang dan pemilihan target sering diputuskan di tingkat sel, secara berkala, sejumlah sel akan melakukan serangan simultan, menciptakan dampak psikologis yang lebih besar.[65]

Pejabat keamanan dan intelijen Thailand cenderung menganggap generasi baru di bawah komando rantai koordinasi organisasi BRN, seenaknya mengabaikan kesenjangan generasi dan tidak adanya perintah-dan-kontrol antara kelompok pengasingan dan militan di wilayah tersebut, yang dikenal sebagai juwae, (“pejuang”) dalam dialek Melayu setempat. Sumber di BRN-Coordinate dan *juwae* mempertahankan bahwa sementara ada dialog reguler antara penjaga tua dan para pejuang muda di wilayah itu, perintah bersama belum diselesaikan. Situasi yang ideal, menurut sumber-sumber juwae dan para pemimpin kelompok separatis lama, adalah untuk melihat seluruh gerakan berevolusi sedemikian rupa dimana militan di wilayah itu menjadi sayap militer, sementara penjaga tua akan berfungsi sebagai front politik. Tapi agar itu terwujud, Thailand harus mengembangkan secara jelas kebijakan tentang masalah negosiasi dengan separatis. Negara-negara tetangga, yaitu Malaysia dan Indonesia, serta Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan fasilitator / mediator potensial lainnya, berpotensi untuk diberikan peran dalam proses perdamaian. Pada dasarnya,Thailand harus memberikan mandat kepada negara-negara ini, serta mediator potensial

63 Kayanee Chor Boonpunth, *An Analysis of the Role of Civil Society in Building Peace in Ethno-Religious Conflict,* hlm. 3.

64 Don Pathan, *Conflict Management and Resolution in Asia: The Role of Civil Societies in Thailand's Deep South*, hlm. 2.

65 *Ibid.,* hlm. 2

lainnya, untuk menengahi atau setidaknya memfasilitasi. Tapi Bangkok tidak pernah nyaman dengan ide "Internasionalisasi" masalah dan petinggi negara tidak pernah menyukai ide proses perdamaian formal karena dalam pandangan mereka tidak perlu memberikan modal politik yang diinginkan.[66]

Secara umum, Bangkok terus mempertahankan bahwa konflik adalah masalah dalam negeri dan bahwa militan lebih kurang adalah penjahat yang termotivasi oleh ajaran Islam yang salah dan sejarah yang terdistorsi. Tapi diam-diam selama beberapa tahun terakhir telah terjadi proliferasi inisiatif yang bertujuan mendirikan proses perdamaian formal atau saluran komunikasi. Masalahnya adalah bahwa tidak ada persatuan di antara lembaga Thailand, tidak ada persatuan di antara para pemimpin kelompok lama, dan tidak ada jaminan kontinuitas, terutama pada saat distabilitas politik yang besar di negeri ini. Selain itu, kurangnya kesepakatan tentang apa peran yang dimainkan kelompok separatis lama. Kebanyakan badan-badan keamanan dan intelijen mengatakan mereka lebih suka berbicara dengan militan di balik kekerasan, bukan pemimpin separatis lama yang memproklamirkan diri yang waktunya mungkin telah berlalu dan yang kemampuannya untuk mempengaruhi *Juwae* dipertanyakan. Turut menambah kesulitan adalah fakta bahwa kelompok separatis lama dengan hubungan kerja terbaik dengan *Juwae* - yaitu BRN-Coordinate - telah menolak bertemu secara terbuka dengan broker perdamaian yang potensial. Sampai semua kesenjangan tertutup, prospeknya lumayan baik untuk memulai keberhasilan negosiasi formal, untuk tidak mengatakan kemungkinan sukses.[67]

Sekarang konflik pindah ke fase baru setelah dialog perdamaian resmi dibentuk antara perwakilan pemerintah Thailand dan kelompok BRN di Februari 2013, yaitu pembicaraan damai resmi pertama yang pernah ada. Konflik fase baru ini dipengaruhi oleh dua faktor baru dimana ada perubahan besar dalam taktis pada kedua belah pihak. Yang pertama adalah pengaruh pembicaraan damai yang resmi. Yang kedua adalah tindakan kontra pemberontakan yang diambil pemerintah, terutama dalam operasi intelijen. Kekerasan kini semakin menjadi perjuangan tertutup dengan kenaikan tajam korban pertempuran di kedua sisi: negara dan militant.

C. Negosiasi dengan Kelompok Separatis

Negosiasi dengan separatis Muslim Melayu bukanlah hal baru bagi Thailand, namun para pejabat selalu ingin menjaganya dari sorotan publik. Pada akhir 1980-an, para pejabat militer Thailand bolak-balik antara

66 *Ibid.,* hlm. 2-3.
67 *Ibid.,* hlm. 3.

Bangkok dan berbagai kota di Timur Tengah untuk bertemu dengan pemimpin separatis. Pertemuan-pertemuan ini mereda pada 1990-an setelah sayap kelompok separatis bersenjata meletakkan senjata mereka. Mengingat apa yang telah kita saksikan pada dekade terakhir, sekarang banyak yang menggambarkan tahun 1990 sebagai “jeda sebelum badai.” Memang, ini adalah periode perawatan generasi baru separatis bersenjata. Sayang bagi perdana menteri, Thaksin Shinawatra, generasi pemberontak yang terbaru ini muncul kembali pada saat ia memerintah pada tahun 2001.

Masalah dengan Thaksin adalah karena ia memandang dan menilai kekerasan dalam perspektif hukum, tatanan dan solusi yang sempit. Karena itu ia menghancurkan pemberontak dengan pendekatan militer. Lima tahun setelah ia berkuasa, Thaksin akhirnya menunjukkan kesediaan untuk berbicara dengan para pemberontak. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir Muhammad, diminta untuk memfasilitasi serangkaian pertemuan antara petugas keamanan Thailand dan pemimpin organisasi separatis yang lama. Pertemuan itu diadakan di Langkawi, Malaysia selama beberapa bulan antara akhir 2005 dan awal 2006. Sejumlah rekomendasi dari pertemuan itu disampaikan kepada Thaksin, tapi kemudian macet karena protes jalanan di Bangkok dan ia tidak memberikan perhatian untuk serius mempertimbangkan rekomendasi tersebut.[68]

Thaksin digulingkan dalam kudeta pada September 2006 dan akhirnya mengasingkan diri untuk menghindari hukuman penjara atas tuduhan korupsi. Mantan panglima militer dan anggota dari Dewan Raja Privy, Surayud Chulanont diangkat menjadi perdana menteri sementara. Pemerintahan Surayud membuat upaya bersama untuk menjangkau kelompok separatis Patani Melayu yang lama. Menjelang akhir masa jabatannya, Surayud bahkan mengadakan pertemuan rahasia dengan seorang anggota senior PULO pada bulan Desember 2007 selama perhentian di Bahrain. Di awal pemerintahannya, Surayud memperpanjang cabang minyak ke masyarakat Melayu di wilayah paling Selatan itu, meminta maaf atas kekejaman masa lalu yang dilakukan terhadap mereka oleh negara, termasuk pembantaian Tak Bai, sebuah insiden yang berakhir pada kematian setidaknya 85 demonstran Melayu Muslim, 78 di antaranya meninggal karena sesak napas setelah ditumpuk satu di atas yang lain di belakang truk militer. Sementara permintaan maafnya disambut oleh penduduk berbahasa Melayu di Selatan, militan di wilayah tidak juga reda. Birokrat Thai, dan masyarakat umum secara keseluruhan sebagian besar acuh tak acuh terhadap permohonan Surayud untuk rekonsiliasi. Pada akhirnya, sebuah kesempatan untuk

68 *Ibid., hlm.*

membangun permintaan maaf dan memberi landasan kerjasama dengan masyarakat internasional tidak terjawab.

Masa pemerintahan Surayud memperlihatkan tahun yang paling keras sejak gelombang kekerasan ini muncul kembali di wilayah ini delapan tahun lalu. Tentara, di sisi lain, menanggapi dengan lonjakan pasukan, mengumpulkan orang-orang yang dianggap bersimpati kepada para pemberontak dan mengirim mereka ke tempat "pelatihan kerja" kamp militer di Selatan yang berfungsi lebih sebagai sebuah "kamp pendidikan ulang." Inisiatif ini berakhir ketika pengadilan Thai campur tangan dengan menyatakan proyek tersebut inkonstitusional.

Setelah pemerintah Surayud, kemajuan pembicaraan dengan cepat mereda. Setelah kudeta, pemerintah terpilih Samak Sundaravej (September-Desember 2008) dan Somchai Wongsawat (Jan-Sept 2008) disibukkan oleh protes jalanan di Bangkok. Samak memang memberi lampu hijau kepada Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, pada bulan September 2008, untuk memediasi pertemuan antara delegasi militer pimpinan Thailand dan sekelompok pemimpin yang diasingkan dari berbagai kelompok separatis, termasuk faksi PULO yang berbeda dari yang telah bertemu dengan Surayud setahun sebelumnya. Berita tentang pertemuan itu bocor ke media. Kementerian Luar Negeri Thailand serta Pemerintah Jakarta, segera menjauhkan diri dari acara tersebut. Inisiatif Kalla pupus seketika. Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva ---setelah merebut kekuasaan pada Desember 2008—mengupayakan untuk membawa kembali supremasi sipil, di mana tentara sejak tahun 2004 sudah berada di kursi pengemudi mengawasi keamanan dan pembangunan di wilayah tersebut. Undang-undang yang memberikan multi agensi kepada Pusat Administrasi Provinsi Perbatasan Selatan (SBPAC) disahkan sehingga memungkinkan lembaga tersebut memperoleh anggaran dana dari pemerintah, jadi tidak harus melalui militer. Karena menangani gerakan separatis, Abhisit memutuskan untuk menyerahkannya dari yang telah ditinggalkan Surayud dan mengizinkan perwakilan dari Dewan Keamanan Nasional (NSC) untuk melanjutkan pembicaraan dengan mantan faksi PULO yang sama dengan yang bertemu dengan Surayud di Bahrain pada akhir tahun 2007.

Pada bulan Agustus 2011, Yingluck Shinawatra menjadi perdana menteri wanita pertama Thailand. Salah satu janji-janji kampanye adalah akan memberikan otonomi kepada mayoritas Muslim Selatan. Tapi dia dan partai Pheu nya cepat mengingkari janji ini setelah kemenangan pemilu mereka karena militer sangat menentang gagasan itu, dengan alasan otonomi itu akan melemahkan keamanan di wilayah selatan. Selain itu,

Partai Pheu Thai tidak memenangkan salah satu dari 11 kursi parlemen dari tiga provinsi paling selatan. Dengan demikian, menunjukkan bahwa otonomi mungkin belum sepenting yang diyakini banyak orang. Hasilnya tercermin pada pola yang muncul setelah pembantaian Tak Bai pada akhir 2004 di mana tidak ada partai politik yang terkait dengan Thaksin yang tidak memenangkan kursi.

Adapun cara untuk menangani gerakan separatis, Yingluck memberikan kewenangan kepada kepala SBPAC, Thawee Sodsong, sekutu dekat dari Partai Pheu Thai, untuk menegosiasikan penyelesaian dengan kelompok separatis. Pada dasarnya, ini berarti mengakhiri proses dukungan kepada NSC. Berbagai instansi pemerintah, kecuali militer, dibawa untuk membantu inisiatif Thawee ini. Thawee bermain-main dengan berbagai gagasan dengan penasihatnya, termasuk memungkinkan kepala SBPAC masa depan terpilih secara lokal. Dia berbicara tentang pemberian ruang budaya yang lebih besar untuk orang Melayu di wilayah bergolak, seperti mendukung penggunaan bahasa Melayu dalam konteks integrasi Asean lebih kuat. Thawee membuat pesan perdamaian dan rekonsiliasi dengan pemimpin gerakan separatis lama yang tinggal di pengasingan. Tetapi pendekatan seperti buku-teks ini gagal karena Thawee mengabaikan berbagai faktor dalam membangun kenegaraan Thailand yang menambah keluhan sejarah dan ketidakpercayaan yang mengakar warga Melayu pada negara Thailand.

Faktor penting lain yang menghambat inisiatif perdamaian Thawee adalah fakta bahwa tidak satupun dari kelompok yang bertemu dengannya, dan kemudian dengan Thaksin Shinawatra dalam pertemuan rahasia di Kuala Lumpur pada pertengahan Maret 2012, memiliki kontrol yang memadai atas generasi baru pemberontak di wilayah itu. Anggota Koordinasi BRN dan lain-lain mengakui bahwa rantai komando sangat cair dan lebih banyak waktu yang diperlukan untuk mengkonsolidasikan perintah-dan-kontrol pada *juwae* (orang Melayu). Dan tanpa Kemampuan untuk secara efektif mempengaruhi *juwae* atau mengekang kekerasan yang sedang berlangsung, upaya Thawee ini bernegosiasi dengan penjaga tua menjadi tak berarti.

Apapun strategi yang ditempuh oleh pemerintah dan kelompok separatis atau pemberontak, satu hal yang tak kalah penting perannya dalam menciptakan perdamaian adalah masyarakat sipil terutama masyarakat terdidik seperti akademisi, profesional, LSM, dan tokoh masyarakat

D. Kemungkinan Penyebab Konflik

Dalam rangka penyelesaian konflik, akar penyebab harus diperjelas terlebih dahulu. Konflik etno-religius di Thailand Selatan memiliki beberapa penyebab termasuk kepedulian dan kesadaran sejarah, marginalisasi ekonomi, isu-isu politik, perbedaan sosial dan budaya, ketidakadilan kesempatan pendidikan dan diskriminasi peradilan. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait faktor penyebab konflik:

Pertama, sejarah politik yang terdistorsi antara Siam dan Kerajaan Patani menciptakan prasangka di kalangan umat Islam di Selatan dan digunakan untuk memobilisasi sentimen terhadap Negara.[69] Kesultanan Patani, dulunya merupakan negara merdeka terletak di antara Thailand yang menganut Budha dan negara-negara Melayu-Muslim di utara Malaysia. Kesultanan ini merupakan daerah penting karena memungkinkan akses ekonomi oleh pedagang India dan Eropa. Ada banyak sumber daya alam seperti kayu, timah, sutra dan gading di sana. Hampir semua orang di kesultanan ini adalah Muslim, berbudaya Melayu dan berbicara bahasa Melayu, bukan Thai. Konstruksi negara-bangsa Thailand, cerita sejarah dan struktur terpusat lembaga negara Thailand, beberapa kali tidak mampu dan tidak mau mengakomodir identitas Melayu mereka yang unik dan cerita sejarahnya. Bahkan sejak pergantian abad ke-20, pemerintah Thailand telah menerapkan kebijakan yang dimaksudkan untuk mengasimilasi provinsi Melayu-Muslim ke dalam tubuh geo-politik Thai yang lebih luas. Melayu lokal di *Deep South* telah menolak upaya ini karena mereka merasa bahwa budaya dan identitas agama mereka yang dipertaruhkan. Rasa keterasingan bertambah oleh kenyataan bahwa wilayah yang bergejolak itu yang biasa disebut sebagai *Deep South,* adalah salah satu daerah yang paling diabaikan.[70] Kebijakan dan kondisi itu mengobarkan emosi separatis menimbulkan arti bahwa budaya Islam diserang. Anak-anak Muslim di Pattani belajar di pesantren. Pada tahun 1921, UU Wajib Belajar Pendidikan Dasar mengharuskan semua anak masuk ke Sekolah Dasar Negeri selama empat tahun untuk belajar bahasa Thai. Hal ini membuat umat Islam merasa bahwa pemerintah Thailand berusaha untuk mengubah Muslim Melayu ke Thailand. Selama akhir 1930-an, naiknya Marshall Plaek Phibulsongkram menjadi Perdana Menteri (periode 1938-1944 dan 1948-1957) dan promosinya terhadap agenda nasionalisme Thai menyebabkan resistensi dan konfrontasi antara Melayu Muslim dan pemerintah di

---

69 Isara News Centre, http://www.isranews.org/south-news/stat-history/item/26389-10subjects.html (accessed 4 March 2014)..

70 Don Pathan, *Conflict Management and Resolution in Asia: The Role of Civil Societies in Thailand's Deep South,* hlm. 1

Bangkok.[71] Resistensi terhadap asimilasi telah mengambil berbagai bentuk dan sebagian didasarkan pada alasan etno-religius, tetapi sebagian pada narasi sejarah-budaya yang melihat klaim negara Thailand sebagai ungkapan dari okupasi dan penjajahan pada abad lalu oleh kekuatan Siam.

Faktor kedua adalah kesenjangan ekonomi. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dipandang turut menjadi penyebab konflik dan kekerasan di Thailand Selatan, dimana tiga provinsi di selatan adalah yang paling rendah perkembangannya.[72] Meskipun Thailand Selatan adalah wilayah yang melimpah dengan sumber daya alam, dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan namun ekonomi etnis Muslim Melayu di tiga provinsi selatan itu tergolong rendah dibanding provinsi lainnya. Seperti dikemukakan oleh Thnaprarnsing bahwa kinerja ekonomi di Thailand Selatan benar-benar membaik dalam beberapa dekade terakhir. Dengan merujuk pada Brain Mc Cartan and Shawn W Crispin ia menjelaskan bahwa antara tahun 1983 dan 2003, rata-rata pendapatan per kapita di Pattani tumbuh dari 9.340 Baht menjadi 57.621 Baht, sedangkan di Yala dan Narathiwat juga meningkat dari 14.987 Baht dan 10.340 Baht menjadi masing-masing 52.737 Baht dan 38.553 Baht. Pendapatan rumah tangga meningkat dari tahun 2002-2004 menjadi 21,99%, 19,27%, dan 21,28% masing-masing untuk Pattani, Yala, dan Narathiwat. Persentase orang yang hidup di bawah garis kemiskinan juga turun, dari 40%, 36%, dan 33% di tahun 2000 menjadi 18%, 10%, dan 23% pada tahun 2004 di Narathiwat, Yala, dan Pattani. Pada tahun 2004, tiga provinsi memiliki 310.000 orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. dibandingkan dengan 610.000 pada tahun 2000. Sebagai perbandingan, pertumbuhan pendapatan untuk semua Thailand pada periode yang sama hanya 9,4%. Realitas di atas menunjukan perumbuhan ekonomi yang signifikan di Thailand Selatan. Namun demikian, dibanding provinsi lainnya, tiga provinsi perbatasan yang didiami Melayu Muslim (Pattani, Yala dan Naratiwat) memiliki pendapatan rata-rata terendah di antara semua provinsi-provinsi selatan. Masih banyak masyarakat di sana yang ekonominya tergolong rendah dan berada di bawah garis kemiskinan. Data menunjukkan 45% dari semua orang Selatan yang miskin tinggal di tiga provinsi perbatasan. [73] Bahkan wilayah selatan adalah daerah yang masih kumuh dan miskin disbanding daerah lain di Thailand.[74] Kesenjangan antara pusat dan daerah pedesaan

---

71 Lihat Colonel Patcharawat Thnaprarnsing, *Solving the Conflict in Southern Thailand,* hlm. 9.

72 Aek Tangsupvattana and Ora-orn Poocharoen, Problems of the Three Southern Border Provinces: Policy Recommendations (Bangkok: Chula Press, 2009), 121.

73 Colonel Patcharawat Thnaprarnsing, *Solving the Conflict in Southern Thailand*, hlm. 9.

74 Brain Mc Cartan and Shawn W Crispin, "An Atol Investigation, Southern Test for New Thai Leader".

telah mengakibatkan keterbelakangan ekonomi jauh di Selatan. Selain itu, ada beberapa alasan kemiskinan konstan di kawasan itu seperti tingkat kelahiran yang tinggi dan kurangnya pendidikan.

Ketiga, masalah sosial politik juga menjadi salah satu penyebab lain konflik. Meski Kolonel Patcharawat Thnaprarnsing mengklaim pemberontakan mungkin tidak disebabkan oleh kurangnya perwakilan politik dari kalangan penduduk Muslim. Karena menurutnya pada akhir tahun 1990-an, Muslim pernah memegang posisi senior dalam politik Thailand, misalnya Wan Muhammad Nor Matha (Muslim Melayu dari Yala) menjabat sebagai Ketua Parlemen dari 1996 sampai 2001 dan kemudian Menteri Dalam Negeri pada masa pemerintahan Thaksin pertama. Pemerintah pertama Thaksin (2001- 2005) juga terdiri dari 14 anggota parlemen Muslim dan beberapa senator Muslim. Muslim menurutnya juga mendominasi majelis legislatif provinsi di provinsi perbatasan, dan beberapa kota selatan memiliki walikota Muslim. Muslim menurutnya juga mampu menyuarakan keluhan politik mereka lebih terbuka dan menikmati tingkat yang jauh lebih besar terkait kebebasan beragama.[75] Terlepas dari yang diuraikan di atas, tidak sedikit yang menilai pemerintah gagal merespon kebutuhan masyarakat setempat karena sebagian besar kebijakan publik diputuskan oleh pemerintah pusat tanpa partisipasi dari masyarakat setempat. Hal ini berkaitan juga dengan kesempatan kerja bagi Muslim di bidang pemerintahan. Muslim kurang memiliki kesempatan kerja dibandingkan dengan tetangga Buddhis mereka. Pejabat pemerintah terdiri hanya 2,4% dari semua Muslim yang bekerja di provinsi, dibandingkan dengan 19,2% dari semua umat Buddha yang bekerja.[76] Pekerjaan di sektor publik Thailand sulit untuk diperoleh oleh Muslim yang tidak pernah sepenuhnya mendapatkan bahasa Thailand atau sistem pendidikan Thailand. Selain itu serangan gerilyawan terhadap sasaran-sasaran ekonomi juga turut mengurangi kesempatan kerja bagi kaum Muslim.

Keempat, perbedaan sosial dan budaya berpotensi menyebabkan ketegangan. Karena identitas Muslim di Selatan berbeda dari warga negara lainnya, masyarakat lokal di wilayah tersebut merasa sangat terhubung dengan orang-orang di Malaysia karena mereka memiliki banyak kesamaan terutama agama, bahasa dan budaya. Selanjutnya, Selatan juga memiliki reputasi karena tingkat kejahatan yang tinggi dan bentuk lain dari bisnis haram. Penyebab kelima adalah masalah pendidikan. 'Pondok', yang

---

75 Colonel Patcharawat Thnaprarnsing, *Solving the Conflict in Southern Thailand,* hlm.

76 Brain Mc Cartan and Shawn W Crispin, "An Atol Investigation, Southern Test for New Thai Leader".

menyediakan pembelajaran agama dan akademik, terlihat menjadi ancaman bagi keamanan nasional karena mereka bisa menjadi tempat berkembang biaknya calon Muslim radikal. Selain itu, karena ketidakseimbangan silabus, hanya beberapa lulusan dari Pondok mampu untuk melanjutkan gelar profesional mereka ke lembaga tinggi. Akhirnya, masalah ketidakadilan adalah salah satu faktor yang merangsang konflik di selatan. Karena kurangnya pemahaman negara dan penerimaannya terhadap perbedaan budaya. Masyarakat setempat tidak percaya pada pejabat pemerintah, juga tidak percaya pada sistem peradilan dan tidak mau bergantung pada proses peradilan nasional.[77]

Kelima, penyebab ketegangan lainnya adalah ketidak-adilan kesempatan pendidikan. Secara umum, Muslim di provinsi perbatasan memiliki tingkat pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan tetangga Buddhis mereka; 69,80% dari populasi Muslim di provinsi perbatasan hanya memiliki pendidikan sekolah dasar, dibandingkan dengan 49,6% dari umat Buddha di provinsi yang sama. Hanya 9,20% dari Muslim yang menyelesaikan pendidikan menengah (termasuk mereka yang lulus dari sekolah-sekolah Islam swasta), dibandingkan dengan 13,20% dari umat Buddha. Hanya 1,70% dari populasi Muslim memiliki gelar sarjana, sedangkan 9,70% dari umat Buddha memegang gelar sarjana. Namun, satu hal yang harus diingat bahwa di sekolah menggunakan bahasa Thailand, dan ini tidak disukai oleh Muslim dan bahkan mereka langsung menarik anak-anaknya keluar dari sekolah Thai. Muslim juga kurang memiliki kesempatan kerja dibandingkan dengan tetangga Buddhis mereka. Pejabat pemerintah terdiri hanya 2,4% dari semua Muslim yang bekerja di provinsi, dibandingkan dengan 19,2% dari semua umat Buddha yang bekerja. Pekerjaan di sektor publik Thailand sulit untuk diperoleh oleh Muslim yang tidak pernah sepenuhnya mendapatkan bahasa Thailand atau sistem pendidikan Thailand. Srangan gerilyawan terhadap sasaran-sasaran ekonomi lebih lanjut mengurangi kesempatan kerja bagi kaum Muslim dan Buddha di tersebut.[78]

Keenam, kegagalan pemerintah dalam menangani masalah pemberontak termasuk melarutkan otoritas negara kunci di kawasan itu. Selain itu, pemerintahan jangka pendek membuat sulit untuk menghasilkan hasil yang nyata.

---

77 Kayanee Chor Boonpunth, *An Analysis of the Role of Civil Society in Building Peace in Ethno-Religious Conflict,* hlm. 4

78 Brain Mc Cartan and Shawn W Crispin, "An Atol Investigation, Southern Test for New Thai Leader".

Ada banyak pandangan yang bertentangan tentang penyebab konflik, tetapi tidak pernah dikonfirmasi apa alasan sebenarnya di balik kekerasan tersebut. Semua faktor di atas berkontribusi pada ketidakpuasan lokal dan ketegangan dalam hubungan etnik. Namun, peneliti percaya bahwa akar penyebab konflik adalah perbedaan antara Muslim di selatan dan sebagian warga negara. Muslim selalu berpikir bahwa mereka diabaikan oleh pemerintah pusat. Mereka menganggap diri mereka dianggap sebagai warga kelas dua di negara itu oleh orang lain.

TEMUAN KHUSUS PENELITIAN

Pertama-tama, harus jelas bahwa ketidakpekaan agama dan budaya telah berkontribusi pada konflik, tetapi konflik ini bukan antara Thailand Buddha dan Muslim-Melayu di selatan. Konflik yang sesungguhnya adalah antara kelompok pemimpin elit radikal Muslim-Melayu, yang sadar secara politik, etnis dan budaya dan oleh pemerintah dilawan dengan kekuatan militer. Ketegangan dan kebencian dari orang-orang di Selatan disebabkan oleh disparitas kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Namun, masyarakat setempat hanya ingin memiliki kualitas damai dan hidup yang lebih baik.

Dalam kerangka resolusi konflik, negara Thailand telah melakukan berbagai upaya besar dengan meningkatkan jumlah pasukan militer dan polisi di daerah konflik untuk menghentikan kekerasan yang mendesak yang merupakan strategi 'penjaga perdamaian'. Namun, penyebaran aparat keamanan tidak bisa menghentikan kekerasan di provinsi ini dan hanya dapat memperoleh perdamaian negatif. Strategi lain yang digunakan adalah 'perdamaian' yang meliputi kegiatan politik. Dialog perdamaian resmi antara negara Thailand dan kelompok pemberontak digelar awal tahun 2013 adalah awal yang baik untuk strategi perdamaian. Sektor masyarakat sipil telah membantu memberikan kontribusi untuk perdamaian dengan mengamati dan memantau meskipun perannya sangat terbatas. Namun, sikap negatif di kalangan masyarakat setempat tetap ada. Strategi ini bisa digunakan bersama-sama dengan 'perdamaian' yang dapat membantu menjaga keseimbangan struktur sosial ekonomi. Strategi ini bertujuan untuk mencegah kekerasan terjadi lagi dan untuk menciptakan perdamaian positif berkelanjutan. Dalam kasus Thailand, kekerasan sedang berlangsung, meskipun sektor masyarakat sipil, aktor utama dalam pembangunan perdamaian, telah memainkan perannya dalam membantu memperbaiki kondisi sejak meningkatnya kekerasan pada tahun 2004.

Jalan buntu dialog politik Muslim telah melahirkan kelompok baru masyarakat yang kreatif dalam mencari solusi mewujudkan perdamaian.

Meskipun tidak mudah, mereka mencoba mendialogkan kepentingan di tengah heterogenitas dalam komunitas Muslim, juga dalam menghadapi pemerintah pusat dengan seluruh kepentingan mayoritas. Mereka nampaknya lebih cenderung membawa perjuangan kea rah yang lebih bersifat substantif dari pada simbolik seperti slogan otonomi atau merdeka. Mereka mengedepankan tema-tema yang langsung terkait dengan kepentingan warga seperti hak berorganisasi, hak memperoleh innformasi dan menyampaikan pendapat, serta pengelolaan tanah. Kelompok kreatif ini memperkuat kesadaran masyarakat dan pemahaman politik, kecintaan pada budaya sendiri serta pelestariannya, pemberdayaan ekonomi rakyat dengan berbagai cara, mulai dari pengusaha kecil dan menengah, hingga ibu rumah tangga. Hal tersebut mereka lakukan dengan cara mobilisasi massa tanpa organisasi besar seperti yang dilakukan oleh gerakan separatis.

Mereka juga berusaha mendapatkan sejumlah bantuan dari negara asing untuk pemberdayaan masyarakat, bukan yang bersifat finansial semata melainkan juga yang terkait pengembangan potensi sumber daya manusia seperti terkait arus informasi, hak asasi manusia yang memungkinkan mereka mendapatkan perlidungan untuk berpendapat, mengekspresikan diri melalui tulisan serta menerbitkan tulisan di media. Hal urgen lainnya adalah memanfaatkan sumber kultural seperti tradisi budaya dan keagamaan yang tidak hanya bersumber dari Islam dan Melayu melainkan juga dari agama dan budaya lain yang dapat menarik simpati dan hasrat kerjasama berbagai komponen masyarakat.

Ringkasnya, penelitian ini telah membuktikan bahwa sektor masyarakat sipil terutama kalangan terdidik seperti para akademisi, profesional, tokoh agama, kalangan LSM tlah memainkan berbagai peran dalam upaya menciptakan perdamaian di Selatan. Bersama-sama dengan aktor lain, sektor masyarakat sipil dapat menjadi bagian penting dari solusi untuk mengurangi kekerasan dan bahkan memainkan peran yang lebih penting dalam membangun perdamaian abadi positif di selatan Thailand ketika kekerasan akhirnya berhenti.

E. Peran Akademisi dalam Menciptakan Suasana Damai

Para akademisi dari Perguruan Tinggi di Thailand Selatan memainkan peran penting dalam menyumbangkan pemikiran dan ide mencari solusi konflik dan gagasan menciptakan perdamaian di wilayahnya. Mereka berperan dalam membantu mempromosikan solusi non-kekerasan dalam mewujudkan perdamaian. Hal itu diwujudkan antara lain dengan memberikan pengetahuan tentang perdamaian dan manajemen konflik.

Akademisi di institusi akademik memiliki peluang yang besar untuk memainkan peran penting dalam memberikan pemikiran, ide dan gagasan mencari solusi yang potensial bagi konflik di wilayahnya. Dari hasil wawancara, ditemukan sejumlah akademisi yang memberikan kontribusi itu, meskipun jumlahnya relatif belum memadai dibanding tajamnya konflk yang terjadi. Misalnya di *Prince of Songkhla University* ada beberapa kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh para akademisinya dalam rangka memberikan pengetahuan tentang studi perdamaian dan wawasan tentang manajemen konflik serta membantu mempromosikan solusi non-kekerasan.[79]

Dapat dikatakan bahwa salah satu upaya sukses yang signifikan yang dilakukan pihak akademisi adalah menciptakan ruang umum (*public sphere*) yang aman bagi pihak terkait untuk berkomunikasi dan menyampaikan ide-ide mereka secara mandiri. Seminar, konferensi, *focused Group Discussion,* dan lain-lain yang diselenggarakan oleh akademisi di institusi-institusi akademik menjadi saluran untuk menyampaikan ide-ide, gagasan dan pemikiran dalam rangka resolusi konflik. Sebagai contoh adalah *International Seminar on Peace building from Various Experiences,* yang diselenggarakan oleh *College of Islamic Studies, Prince of Songkla University, Pattani* pada 7 Juli 2007. Tentu ada banyak kegiatan lain serua yang dilakukan baik oleh kampus ini maupun kampus-kampus lainnya.

Karena kuatnya jaringan akademis pada sektor masyarakat sipil, solusi otonomi yang pernah dilarang oleh pemerintah, sekarang secara luas diterima untuk dibahas di depan umum. Ide-ide yang didukung oleh pengetahuan dan data akademik yang dihasilkan oleh para akademisi melalui kegiatan penelitian ilmiah saat ini lebih banyak digunakan dibanding solusi berdasarkan perasaan atau opini dari pihak lain.[80]

Menurut Kumpee Thongpoon, saat ini, ada sedikit saja program pendidikan perdamaian dan resolusi konflik untuk tingkat sarjana di Thailand, namun ada banyak mahasiswa pascasarjana yang melakukan penelitian tentang materi ini, misalnya pada pusat pendidikan hak asasi manusia dan pusat penelitian perdamaian di Universitas Mahidol. Di Universitas Chulalongkorn ada program studi perdamaian dan studi konflik berdurasi 3 bulan yang disponsori oleh Rotary Club International. Di Thailand Selatan, baru sedikit kurikulum pendidikan yang berfokus pada pendididkan perdamaian. Inilah yang menjadi problem pendidikan di daerah

79 Wawancara dengan Dr. Ibrahem Narongraksakhet, Kepala Reseach Center Prince of Songkhla University pada tanggal 18 Agustus 2016.

80 Wawancara dengan Dr. Ibrahem Narongraksakhet, Kepala Reseach Center Prince of Songkhla University pada tanggal 18 Agustus 2016.

tersebut. Padahal menurutnya, kurikulum pendidikan perdamaian sangat diperlukan di Thailand Selatan sebagai strategi perdamaian. Komunitas politik dan budaya otonom harus dibangun di Thailand Selatan. Lembaga ini menurutnya dapat menjadi sumber resolusi konflik dan pendidikan perdamaian, promosi hak asasi manusia dan keadilan, dan pusat koordinasi bagi masyarakat.[81]

Menanggapi kurangnya mekanisme manajemen perdamaian nasional dan manajemen konflik antar-etnis serta kurangnya kerangka pikir berbasis konflik, akademisi di lima universitas di tiga provinsi selatan mendirikan Jaringan Perdamaian Thailand Selatan yang dikenal dengan *the Southern Thailand Peace Network* (STPN).[82] STPN bertujuan untuk menanamkan pandangan tentang perdamaian melalui kerjasama antar universitas melalui kegiatan pengembangan kurikulum, penelitian, pembangunan kapasitas sumber daya manusia berperspektif resolusi konflik dan perdamaian, serta kegiatan advokasi perdamaian. Di tengah-tengah upaya yang mengagumkan ini adalah lembaga pendidikan tinggi Islam ternama –Yala Islamic University (YIU) yang saat ini lebih dikenal dengan Fatoni University[83] menjadi peserta aktif STPN. Menariknya, FTU menerapkan kurikulum pendidikan integratif yang wajib dipelajari oleh semua mahasiswa. FTU menggabungkan manajemen perdamaian dan konflik perspektif Barat dan Islam. Idenya adalah untuk membuktikan bahwa Islam kompatibel dengan modernitas tanpa kehilangan moralitas, yang menjadi sumber utama ketegangan antara umat Buddha dan Muslim. Selain upaya-upaya lokal, FTU juga melakukan

---

81 Kumpee Thongpoon, *Peace Education in the Universities of Southern Thailand,* Faculty of Political Scince, Hatyai University, Songkhla, November 2013, hlm. 5.

82 Lima Universitas anggota Jaringan Perdamaian Thailand Selatan (STPN) adalah Prince of Songkla University (Pattani), Prince of Songkla University (Hat Yai), Thaksin University (Songkla), Hat Yai University (Hat Yai), and Yala Islamic College (Pattani) yang sekarang berubah nama menjadi Fatoni University.

83 Dulu universitas ini bernama Yala Islamic College (YIC) yang terletak di Provinsi Yala. Setelah menerima bantuan dana dari Timur Tengah untuk pembangunan gedung di Provinsi Pattani, diusulkan perubahan nama menjadi Patani Islamic University. Namun, kondisi politik di Thailand Selatan saat itu tidak memungkinkan memakai nama Patani maupun Pattani. Akhirnya, diubah menjadi Yala Islamic University (YIU). Meskipun berada di provinsi Pattani, tetap digunakan nama Yala (provinsi Yala). Bagi pemerintah Thailand, Patani identik dengan Melayu dan Melayu diidentikkan dengan Islam. Patani adalah sebuah wilayah yang melingkupi Provinsi Pattani, Provinisi Yala, dan Provinsi Narathiwat. Di wilayah inilah lahir 'pemberontakan' Patani Merdeka—seperti Aceh di Indonesia. Karena alasan itu, kampus tersebut diberi nama Yala Islamic University (YIU). Sekarang kampus ini berganti nama lagi menjadi Fatoni University (FTU). Dengan alasan politik, kata "Islam" dihilangkan. Kata Fatoni maksudnya adalah dari istilah bahasa Arab *Fathanah* berarti 'mencerdaskan'. Selengkapnya: http://www.kompasiana.com/pelangi-rn/cara-belajar-islami-di-fatoni-university-thailand_552c373c6ea834731e8b4589.

kerja sama dengan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) dan *United States Institute of Peace* (UNIP) untuk mempromosikan teknik perdamaian, rekonsiliasi dan teori perdamaian dalam hubungan lintas-pendidikan.[84]

Terkait penelitian, hingga saat ini, ada banyak sarjana dari berbagai perguruan tinggi dan universitas mencoba untuk melakukan penelitian untuk mengetahui cara memecahkan masalah di Thailand Selatan. Tapi, sebagian besar sarjana dan penelitian berasal dari negara lain. Sebaliknya ada banyak universitas dan perguruan tinggi di Thailand, namun hanya beberapa saja yang fokus pada masalah konflik. Sebagai contoh adalah *Faculty of Political Science* dan *Center for Conflict Studies and Cultural Diversity* pada Prince of Songkla University, kampus Pattani, serta lembaga riset yang bernama *Deep South Watch* (DSW) yang bermarkas di "*Faculty of Humanities and Social Sciences Prince of Songkhla University Patani Campus*". Institusi ini inisiator dan pimpinannya merupakan dua orang akademisi senior, Ayub Pathan dan Dr. Srisombop Jitpiromsri, mantan Dekan "*Faculty of Humanities and Social Sciences Prince of Songkhla University Patani Campus*", sebelumnya pimpinan pada institusi riset "*Center for South Conflict and Diversity* (DSCD)"di fakultas yang sama. [85] Beberapa akademisi di tiga wilayah tersebut serta peneliti sosial politik dan sejumlah akademisi Songkhla juga turut terlibat di DSW. Institusi ini mengadakan sejumlah penelitian mengenai konflikdan kekerasan di Thailand Selatan, karena itu ia berperan sebagai gudang data kuantitatif yang relatif detail dan komprehensif mengenai konflik dan insiden-insiden kekerasan yang terjadi di Thailand Selatan yang disertai dengan analisis yang mendalam.[86] Sejumlah penelitian yang dihasilkan oleh lembaga ini dijadikan referensi oleh peneliti asing maupun pihak media. DSW merilis pula sejumlah data pada website mereka, "www.deepsouthwatch.org". Selain itu, riset-riset yang mereka hasilkan juga menawarkan beberapa solusi politik alternatif untuk penyelesaian konflik di Selatan. Sebagian rekomendasi penelitian terutama yang terkait dengan pembangunan telah pula mereka wujudkan menjadi aksi nyata melalui kegiatan pengabdian masyarakat.

---

84 Interview dengan Shukree Langputeh, wakil rector bidang kerjasama Fatoni University, 19 Agustus 2016.

85 Interview dengan Dr. Srisombop Jitpiromsri, pada tanggal 19 Agustus 2016.

86 Sebagai salah satu contoh lihat ringkasan hasil penelitian DSW yang telah dipublikasi di jurnal: Srisompob Jitpiromomsri, "*The Southern Thai Conflict Six Years On: Insurgency, Not Just Crime*", Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, Published by Institute of Southeast Asian Studies, Volume 32, Number 2, August 2010.

Di Universitas Mahidol juga terdapat lembaga kajian Hak Asasi Manusia dan Perdamaian (*Human Right and Peace Studies Institute*) dan *Research Center for Peace Building*. Sayangnya para akademisi ini nampaknya relatif kurang memiliki kolaborasi yang kuat untuk menkoneksikan kekuatan antar akademisi maupun institusi akademik yang memungkin membantu penyelesaian konflik yang akut di Selatan. Bisa jadi, kekuatan yang dibangun belum sebanding dengan tajamnya konflik mengingat telah berlangsung lamanya konflik di Selatan.

Beberapa kampus juga terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat bekerjasama dengan pemerintah. Sebagai contoh adalah program pengembangan ekonomi kerakyatan yang dilakukan oleh akademisi pada *Prince of Songkhla University.* Program tersebut antara lain adalah pertanian dan peternakan terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asumsinya adalah bahwa damai yang hakiki adalah antara lain terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Mengingat salah satu faktor yang menyulut konflik tersebut adalah kesenjanagan ekonomi, maka program pengembangan kesejahteraan finansial masyarakat diharapkan turut berkontribusi padaresolusi konflik.

Sementara itu di Fatoni University, beberapa akademisinya seperti Dr. Ismail Lutfi, Dr. Shukree Langputeh juga terlibat aktif dalam membawa pesan-pesan perdamaian baik melalui seminar, konferensi baik di dalam maupun luar negeri serta majlis ilmu dengan masyarakat setempat. Selanjutnya, peran akademisi juga membantu mempromosikan tumbuhnya semangat sukarela pada anak-anak dan remaja yang dipandang sebagai pelaku utama untuk menjaga perdamaian abadi di wilayah ini.

Tidak banyak tokoh kunci dari jaringan masyarakat sipil yang memainkan peran penting di Thailand Selatan. Banyak dari mereka adalah dari jaringan akademisi dan satu orang bisa terlibat dalam satu atau lebih organisasi, institusi atau kelompok masyarakat sipil. Selain itu juga satu orang juga dapat memerankan lebih dari satu peran sekaligus, misalnya selaku akademisi sekaligus selaku tokoh masyarakat bahkan tokoh agama. Tidak mengherankan, sebagian besar kelompok masyarakat sipil di Selatan diinisiasi dan dibentuk oleh umat Islam karena mereka mayoritas di wilayah ini dan dimaksudkan untuk memberdayakan mereka. Ada yang bekerja penuh-waktu (*full-day*) dan ada juga yang bekerja paruh waktu (*part day*). Mereka yang bekerja untuk kelompok-kelompok masyarakat sipil di Selatan sebagian besar adalah relawan yang sudah memiliki pekerjaan penuh waktu.

F. Peran Jurnalis dalam Menciptakan Suasana Damai

Para jurnalis tidak kalah penting dalam mewujudkan perdamaian. Karena sikap *under-estimate* dan cara pandang yang salah antara satu sama lain dapat mempertajam konflik. Sebaliknya media yang memiliki perspektif damai dapat mempengaruhi warga untuk mewujudkan perdamaian. Sebelumnya media Thailand lebih mengekspos berita yang berimplikasi pada ketidak saling percayaan, mengabadikan iklim ketakutan, dan memperburuk hubungan etnis. Mayoritas orang Thailand hingga percaya bahwa Muslim Melayu merupakan ancaman keamanan nasional, pemberontak, dan warga yang tidak loyal hingga memerlukan hukuman yang berat. Satu jajak pendapat yang mengkhawatirkan melibatkan 1.154 warga Thailand yang dilakukan pada bulan Oktober 2005, misalnya, menunjukkan bahwa lebih dari 60% responden percaya kurangnya patriotisme adalah motif pemberontakan, dan lebih dari 50 persen sepakat bahwa pelaku layak dieksekusi di luar hukum.

Namun jaringan jurnalis Thailand Selatan secara substansial turut memperbaiki cara pandang orang Thailand karena sudah menyertakan perspektif lokal yang lebih beragam dan berimbang terkait konflik. Selain mengorganisir diri dalam rangka menambah kuatnya posisi, mereka mempublish media yang bersifat *online*. Media ini berperan sebagai pusat berita informal yang menyampaikan berita secara lebih mendalam dan terbuka. Mereka memiliki jaringan yang mereka namai "V*oice Peace*" pada link "www.voicepeace. org" disamping bekerja di media umum atau komersial.

Selain itu terdapat pula sejumlah jurnalis yang bekerja di Berita *Issra Centre*. Media ini sekarang dianggap sebagai sumber utama dari " berita yang tidak bias" di Thailand Selatan, dan lokasinya di provinsi Patani. Media ini membuat pelaporan bahkan lebih berwibawa dibandingkan dengan banyak organisasi berita lainnya yang mengandalkan satu atau dua stringer. Website *Issra Centre* mengeksplorasi beberapa dimensi dari konflik selain terkait keamanan nasional, seperti dimensi pembangunan ekonomi, pendidikan dan keadilan sosial. Dengan dmikian, jurnalisme berperspektif damai telah memperluas prospek keamanan nasional baik bagi pemerintah maupun warga.

G. Peran Tokoh Agama dalam Membawa Pesan Perdamaian

Para ulama adalah sosok yang paling tepat dan mengena dalam mendamaikan hati masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang makna damai yang sesungguhnya menurut perspektif Islam. Berikut

kutipan wawancara ketika seorang tokoh agama di Naratiwatt menyinggung tentang hakekat "damai".

> "Islam secara literal bermakna "damai", "selamat", "tenteram", dan "sentosa". Konsep Islam sebagai agama damai harus ditanamkan sedini mungkin, baik melalui pendidikan, ceramah-ceramah maupun dialog-dialog keagamaan. Ada sebagian orang yang salah paham dalam mengartikan kata damai. Damai seringkali dimaknai hanya dengan dua pihak atau kelompok yang hidup berdampingan secara harmonis. Padahal, kehidupan pribadi pun harus damai."

Dengan demikian, konsep kedamaian yang dimaksud Islam bukan hanya damai dalam konteks dua pihak atau dengan orang lain, tapi juga damai dalam diri sendiri. Dalam konteks ini, tokoh agama adalah figur yang paling berperan dalam melakukan bimbingan spiritual untuk menciptakan damai dalam diri melalui majlis ilmu dan kajian agama dan posisinya sebagai *role model* di tengah masyarakat. Ada beberapa proses pengajian yang diselenggarakan setiap minggu di Thailand. Satu di antaranya yang menarik untuk disampaikan di sini adalah yang diinisiasi oleh Dr. Ismail Luthfi sejak tahun 1986.

Ulama dan tokoh agama seperti Ismail Lutfi Japakiya, Ahmad Umar Japakiya –sekedar menyebut beberapa nama– adalah tokoh agama/ulama yang turut berperan dalam mewujudkan dan mengupayakan resolusi konflik dan menciptakan perdamaian. Hal ini mereka lakukan dengan mempromosikan perdamaian dan membawa pesan damai melalui pendidikan dan dakwah serta performanya yang lemah lembut dan kharismatik di tengah masyarakat. Dr. Ismail Lutfi Japakia misalnya adalah sosok penting dalam membangun perdamaian di Thailand Selatan. Ia adalah sosok yang berpengaruh, bukan saja karena peran akademisnya selaku Rektor pada Fatoni Universty, tetapi juga karena posisinya selaku pendidik di pesantren yang dimilikinya dan ulama/tokoh agama. Sebagai seorang sarjana Muslim lulusan Timur Tengah yang menghabiskan waktu selama 15 tahun belajar di Saudi Arabia sampai meraih gelar Doktor,[87] ia memiliki

87 Ia memperoleh gelar Ph.D dari Universitas Islam Imam Muhammad Ibn Sa'ud di Riyadh, Arab Saudi. Dengan tesis bidang Politik Islam berjudul Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Munakahat wa al-Muamalah (Kesan Dua Negeri "Darul Islam" dan "Darul Harb" Pada Munakahat dan Muamalah Islam), karya beliau ini diterbitkan Darus Salam, Qahirah serta dibaca di seluruh dunia. Sebelumnya beliau mendapat Ijazah Sarjana Muda (B.A) Usuluddin di Universiti Islam Madinah dan seterusnya Ijazah Sarjana (M.A) Fiqh Perbandingan juga di Universiti Imam Muhammad Ibn Sa'ud. Mencari imu menjadi prioritas utamanya. Hal ini karena sejak kecil beliau telah diasuh oleh ayahandanya Tuan

pengetahuan dan wawasan keislaman yang luas. Ia selama bertahun-tahun mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam yang *rahmatan lil alamin,* antara lain melalui "majlis ilmi" yang diselenggarakan di Mesjid Ibadurrahman terletak di kompleks madrasah al-Rahmaniah Desa Beraol, Pujud. Pengajian yang dilakukan dengan pendekatan persuasif dan lemah lembut yang menekankan pada ukhuwah "*ummatan wahidah*" ini dikenal dengan Majlis ilmi, diselenggarakan secara terbuka untuk umum pada setiap hari Sabtu dengan jemaah 1000 sampai 5000 orang yang datang dari berbagai daerah di Thailand dan ada juga yang dari Malaysia. Sebagian besar kajian-kajian ini juga disiarkan melalui radio yang dapat diakses oleh jemaah di lima provinsi bagian Selatan. Selain itu juga tidak sedikit yang direkam dan di*share* melalui media seperti youtube. Ismail Lutfi juga aktif menulis. Di antara tulisannya adalah tafsir surat-surat al-Quran dalam bahasa Melayu, dan sejumlah buku agama lainnya terkait ibadah dan kemasyarakatan.

Dr. Ismail Lutfi Japakia juga memiliki kharisma serta kompetensi sosial dan interpersonal yang baik sehingga memungkinkannya untuk memainkan peran sebagai *role model* dalam mempromosikan budaya damai sebagaimana dalam ajaran Islam. Hal tersebut juga didukung oleh kondisinya yang miliki jaringan yang luas karena terlibat aktif dalam organisasi sosial politik dan sosial keagamaan yang diinisiasi pemerintah untuk mengatasi masalah sosial politik di Thailand Selatan. Dalam konteks konflik etno-religius seperti yang terjadi di Thailand Selatan, hal ini menjadi sangat penting untuk menanamkan cara pandang Islam dan menumbuhkan sikap positif dalam mewujudkan perdamaian di Selatan.

Untuk mewujudkan perdamaian di Selatan, diperlukan pula sikap saling pengertian dan saling menghormati antar umat beragama dan mendorong budaya damai dalam rangka mengatasi konflik yang terjadi. Karena itu meniscayakan pula komunikasi harmonis tingkat tokoh agama yang menyentuh akar rumput untuk memperkuat kepercayaan di antara masing-masing komunitas lintas agama dan menciptakan perdamaian sesungguhnya. Dimaksudkan untuk memenuhi keperluan tersebut sejak tahun 2009, terbentuk Dewan Antar-Agama Thailand (*Inter-Religious Council of Thailand*) adalah organisasi afiliasi antar agama untuk mewujudkan perdamaian di Thailand yang menyatukan para pemimpin agama dari agama Buddha, Kristen, Islam, Hindu, dan Sikh. Saat ini co-presidennya adalah Dr Ismail Lutfi Japakiya, Rektor Fatoni University, Pattani. Dialog antar penganut Budha dan Islam misalnya pernah dilakukan oleh sekretariat *Religions for Peace Inter-Religious Council of Thailand*

Guru Haji Abdul Rahman Bin Haji Abdul Latif, seorang ulama setempat.

bekerja sama dengan *Human Rights and Peace Studies* Universitas Mahidol di Songkhla dalam rangka memperkuat kerjasama antar penganut agama pada 1-2 November 17, 2016.[88]

Buddha-Muslim Dialog Antar-agama di Songkhla, Thailand

Para pimpinan lembaga pendidikan seperti pondok pesantren tidak kalah penting dalam menciptakan perdamaian. Pesantren At-Tarkiyah yang berlokasi di Naratiwat misalnya menerima sejumlah santri yang orang tuanya meninggal karena korban konflik dan kekerasan. Mereka dapat menikmati pendidikan secara gratis yang disertai dengan *living cost*. Beberapa di antara mereka dijadikan anak asuh oleh pimpinan pesantren tersebut dan dibiayai pendidikannya sampai ke tingkat perguruan tinggi. Setelah kembali mereka diharapkan dapat kmbali mengabdi dan memberdayakan masyarakatnya. Paisan Toryib[89], pimpinan pesantren yang sekaligus adalah senator Thailand mengatakan: "hal itu diharapkan mengurangi derita masyarakat yang dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menyumbang pada terciptanya perdamaian". Bila tidak ada solusi masalah bagi mereka yang menjadi korban kekerasan, maka tidak menutup kemungkinan muncul rasa dendam yang berimplikasi pada konflik bahkan kekerasan lainnya.

88 Buddhist–Muslim Inter-religious Dialogue in Songkhla, Thailand, https://www.peacemakersnetwork.org/buddhist-muslim-inter-religious-dialogue-songkhla-thailand/ diakses pada 10 November 2016.

89 Interview dengan Paisan Thoryib pada Oktober 2016

H. Peran Lembaga Swadaya Masyakat (LSM)

Berdasarkan wawancara, ditemukan sejumlah kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melaksanakan peran resolusi konflik dan membangun perdamaian. Secara garis besar, peran mereka dapat dikelompokkan menjadi tiga peran utama yaitu antara lain dengan berperan sebagai pemberi bantuan/*relief worker*, berperan sebagai pihak yang menjembatani (*bridge builder*), dan peran akademik. Tugas utama pekerja bantuan/*relief worker* adalah mengunjungi orang yang luka-luka karena kekerasan dan mendistribusikan bantuan keuangan untuk para korban dan keluarga mereka. Dalam rangka memberikan bantuan mendesak kepada korban kekerasan, tugas dan peran sebagai *relief worker* sangat diperlukan, terutama ketika negara tidak hadir memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama dan lebih banyak prosedur. Sementara tidak sedikit perempuan yang kehilangan suami dan anak laki-laki, baik karena mati ditembak, atau ditangkap karena tuduhan keterlibatan dalam gerakan pemberontakan dan separatism. Sejumlah perempuan karena ditinggal suaminya, terpaksa menanggung beban keluarga padahal tidak memiliki pengalaman kerja. LSM *relief worker* membantu para janda korban konflik ini mencari pekerjaan meski sangat terbatas dan tak menentu; membantu mencarikan beasiswa untuk anak-anak, membela yang tertuduh di pengadilan menjalin kerja sama dengan sejumlah *lawyer* yang berkenan membantu orang-orang miskin tanpa biaya. Selain itu, *relief worker* juga memiliki proyek-proyek jangka panjang, seperti melatih warga di daerah konflik untuk memiliki kompetensi dan *skill* tertentu, pelatihan pengembangan karir atau menyediakan akomodasi. Program-program pengembangan masyarakat semacam ini telah diluncurkan karena memberikan uang bukan solusi berkelanjutan. Selain itu, ada pula LSM yang menyadari kebutuhan untuk menyembuhkan pikiran (*trauma healing*) para korban dengan memberikan dukungan moral dan konsultasi psikologi. Mengingat pekerjaan bantuan bukanlah tugas yang rumit dan mampu mendapatkan dana dengan mudah, peran ini tampaknya sangat populer di kalangan kelompok masyarakat sipil yang berhubungan dengan konflik Selatan. Pekerjaan memberi bantuan dipandang sebagai kesempatan yang mudah oleh beberapa LSM, sehingga kadang ada LSM palsu yang mengambil kesempatan dengan menggunakan kesempatan dan pekerjaan ini untuk kepentingan pribadinya.

Tidak jarang LSM memainkan lebih dari satu peran; sebagai *relief worker*, *bridge builder* dan peran akademik. Peran sebagai *bridge-builder* adalah yang paling banyak dimainkan di wilayah Selatan. Untuk mengisi kesenjangan dan perbedaan agama, budaya, identitas dan cara hidup, LSM

antara lain bertindak sebagai jembatan yang memediasi antara pemerintah dan masyarakat setempat di Selatan sehingga lebih dekat satu sama lain. Karena orang takut menjadi target kelompok negara atau militan, beberapa LSM bertindak sebagai jembatan pembangun yang menciptakan pemahaman yang lebih baik dan memperkuat kepercayaan di antara pihak yang bertikai. Sebagai contoh, mengingat terbatasnya lapangan pekerjaan bagi perempuan, baik di swasta mapun di birokrasi. Melalui sejumlah departemen, LSM bernegosiasi ke pemerintah pusat agar pemerintah lebih menyediakan lowongan kerja bagi perempuan. Usulan tersebut dirsepon secara baik oleh pemerintah, meskipun memerlukan proses bertahun-tahun.

Seluruh kegiatan LSM, *grass-root* dan para akademisi menghasilkan pendataan yang bersifat komprehensif yang dikelola oleh *Deep South Coordinator Center* (DSCC), lembaga riset yang berpusat di Fakultas Teknologi Prince of Songkhla University kampus Patani. Center riset ini selain berperan dalam pemberdayaan kelompok-kelompok lain, juga terutama mendata para korban, anak-anak, dan janda, menjelaskan status dan kondisi mereka serta memantau para korban di rumah sakit dan melalui LSM. Hingga tahun 2009, misalnya, institusi ini bekerjasama dengan 47 rumah sakit dengan memberikan data korban, anak dan janda secara rutin. Lembaga ini setidaknya memiliki daftar 1063 anak dan 400 janda. Setelah dicek, data ini didistribusikan ke pemerintah, LSM untuk dapat ditindaklanjuti melalui program pemberdayaan.

Sementara itu, peran akademik antara lain dilakukan dengan *pertama*, melakukan penelitian dan kajian tentang konflik dan resolusinya menuju perdamaian. Dengan mengadakan dan menyajikan data yang valid dan akurat tentang konflik diharapkan upaya penyelesian dapat dilakukan dengan optimal. *Kedua* peran akademik dilakukan dengan membangun kapasitas masyarakat (*capacity building*) dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Ketertinggalam masyarakat dalam bidang sosial ekonomi di Selatan antara lain disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, wawasan serta lemahnya kompetensi dan *skill* SDM setempat. Karena itu dengan maksud megembangkan kapasitas dan kompetensi masyarakat, beberapa LSM melakukan kegiatan berupa pelatihan, workshop dan pendampingan untuk penguatan masyarakat. Karena sebagaimana diakui oleh Ahmad Somboon "Selama masih ada kesenjangan, kemiskinan, dan ketidakadilan sulit untuk menghadirkan perdamaian,"[90]

---

90 Ia adalah konsultan pada Thailand Research Council dan anggota "*National Recociliation Commission*" yang dibentuk saat pemerintahan PM Thaksin Shinawatra tahun 2004 dalam rangka mencari solusi untuk kasus-kasus kekerasan yang berskala besar.

Jumlah LSM semakin bertambah dari waktu ke waktu dan ukurannya juga semakin meluas. Salah satu penyebabnya adalah bahwa sebagian besar LSM biasanya terbuka bagi siapa saja yang tertarik pada tujuan dan kegiatan mereka dan tidak memiliki persyaratan keanggotaan. Selain itu, banyak LSM yang berkantor di daerah kota yang membuatnya mudah untuk terhubung dan berkomunikasi dengan masyarakat.

Kelompok LSM kurang terevaluasi dan kurang mendapatkan *feed-back* dari penduduk setempat. Tampaknya masyarakat lebih peduli pada proses dari pada hasilnya. Hal yang baik adalah bahwa sebagian besar kelompok LSM memiliki struktur yang sederhana dan fleksibel yang membuat mereka cocok untuk diterapkan dalam keadaan tidak pasti. Kesulitan dalam mencari dukungan keuangan tidak menjadi perhatian bagi beberapa LSM dan mereka biasanya menerima dana lebih dari satu sumber. Berbagai sumber dana yang tersedia bagi LSM antara lain adalah negara, organisasi internasional, masyarakat, sumbangan dari anggota mereka sendiri, dan kelompok-kelompok bisnis swasta. Secara umum, dukungan keuangan utama bagi kelompok masyarakat sipil di Selatan adalah dari organisasi-organisasi internasional.

Kerjasama antara LSM dan sektor lainnya adalah penting untuk keberhasilan kelompok mereka. Tanggapan masyarakat terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat sipil cukup baik karena sebagian besar proyek didasarkan pada kebutuhan penduduk setempat. Beberapa LSM bekerja sama satu sama lain sementara beberapa melihat kelompok lain sebagai pesaing untuk pendanaan mereka. Hubungan antara LSM dan negara beragam. Beberapa LSM mendapat perhatian dukungan pemerintah, namun juga ada yang kurang mendapat dukungan pemerintah. Hal ini antara lain tergantung pada karakter LSM itu sendiri dan pendekatannya dalam berkomunikasi dengan pemerintah, selain itu juga ditentukan oleh *concern* dan bentuk program yang biasa mereka usung. LSM yang programnya terkait dengan keamanan lebih memiliki peluang yang besar untuk memperoleh dana dari pemerintah dibanding yang lain. Karena keamanan sejalan dengan misi pemerintah. LSM relatif kurang berhasil menjalin kerjasama dengan sektor bisnis. Satu-satunya kegiatan yang sektor bisnis terlibat adalah dalam memberikan sumbangan atau bantuan keuangan. Hubungan dengan organisasi internasional terjadi dalam banyak cara, misalnya, sebagai sumber pendanaan, atau untuk bertukar pengetahuan dan berbagi data.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa data dan penjelasan di atas menunjukkan bahwa sektor masyarakat sipil terutama kalangan terdidik seperti akademisi, profesional, tokoh agama dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memainkan peran penting dalam membangun perdamaian. Telah diterima secara luas bahwa masyarakat sipil terlibat dalam mewujudkan perdamaian abadi di wilayah konflik. Masing-masing memiliki karakteristik dan memainkan peran yang berbeda dalam resolusi konflik. Realitas ini sejalan dengan pandangan beberapa sarjana. Lihat misalnya, Model Perdamaian oleh Stephen Ryan dan Strategi partai ketiga dalam transformasi konflik oleh Cordula Reimann. [91]

Di Thailand, kelompok-kelompok masyarakat sipil yang kritis lahir secara nasional dan tak dapat dipisahkan dari dinamika tuntutan demokratisasi dan keterbukaan di negeri sendiri. Selain itu dipengaruhi pula oleh "trend *civil society* yang bersifat global", antara lain sejumlah bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari "Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)" dalam berbagai aspek turut memperkuat *civil society* lokal ini.

Kelompok ini lahir dari proses penguatan *civil society* di tengah banyaknya persoalan dan bahkan kebuntuan dialog minoritas Muslim dengan pemerintah pusat, untuk mendapatkan hak-hak minoritas melalui jalan damai. Kelompokmasyarakat kritis tersebut lahir bersamaan berkembangnya demokratisasi yang seiring dengan globalisasi. Proses demokratisasi memungkinkan warga mengorganisir diri mereka sendiri dan menyampaikan aspirasi mereka secara mandiri, tanpa pengaruh partai politik birokrasi, dan aktor-aktor pemerintah pusat, serta hegemoni dan kekuasaan pemimpin lokal yang sebelumnya melalui gerakan separatisme memonopoli aspirasi Muslim.

Hampir semua kelompok *civil society* ini bersikap non-partisan terhadap gerakan separatis. Mereka lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat

---

91 Stephen Ryan, *Ethnic Conflict and International Relations* (Hants: Dartmouth Publishing Company, 1990), 51; Cordula Reimann, "*Assessing the State-of-the-Art in Conflict Transformation*," Research Center for Constructive Conflict Management 2004, http://www.berghof- handbook.net/documents/publications/reimann_handbook.pdf (diakses tanggal 13 January 2013).hlm. 4

dengan memperkuat ekonomi rakyat dan menyalurkan agagasan politik melalui pembangunan kesejahteraan dan penyelesian masalah-masalah sosial yang rentan terhadap konflik, ketimbang memobilisasi masyarakat untuk membentuk gerakan tertentu. Mereka secara terbuka menjelaskan misi dan agendanya kepada publik baik melalui media massa, publikasi, orasi, seminar, ceramah agama maupun melalui pengembangan SDM dan kapasitas masyarakat secara langsung. Namun demikian ini tidak berarti gerakan dan langkah civil society ini selalu lebih reformis dan akomodatif dibanding gerakan kelompok separatis. Mereka tidak mau kompromi dengan pemerintah pusat, bila terkait dengan aspirasi substansial seperti hak politik, penguasaan sumberdaya alam dan tanah pada umumnya

Selain itu, kedua gerakan ini, dalam aspirasi yang bersifat substansial mempunyai irisan yang kuat, dan memiliki strategi pencapaian yang berbeda. C*ivil soceity* lebih cenderung memperkuat *public sphere* dan secara langsung memberdayakan ekonomi, meski diakui bahwa kelompok *civil society* yang non-partisan ini belum mampu menandingi kemampuan gerakan separatis dalam menegosiasikan kepentingannya pada pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah sejauh ini lebih memberikan perhatian kepada gerakan separatis dibanding gerakan *civil society*, meski tidak berarti mengabaikan mereka.

Peran dan gerakan *civil society* menunjukkan peningkatan tuntutan kepada pemerintah untuk menghormati minoritas seiring dengan berkembang pesatnya globalisasi dan demokratisasi di berbagai negara di dunia. Fenomena ini tampak berpengaruh pada hubungan minoritas-mayoritas serta hubungan pemerintah pusat dan Muslim sebagai minoritas. Hal ini tercermin dari semakin kuatnya kesadaran pada hak-hak kelompok minoritas serta makin bervariasinya bentuk gerakan dan aspirasi. Kalau dulu biasanya ada dua model yang berebeda. Model yang bersifat akomodatif yang dibangun oleh pemerintah pusat dan kelompok mayoritas di satu sisi, dan model gerakan separatis di s sisi lain. Sekarang pilihannya tidak lagi hitam putih antara kedua model tersebut yang selama ini berujung pada polarisasi gerakan. Gerakan kelompok *civil society* yang dilakukan oleh kaum terdidik seperti akademisi, professional, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM dan individu tertentu lebih membentuk garis tengah dengan menjadi gerakan keagamaan dan sosial lebih bersifat non-partisan terhadap gerakan politik tertentu maupun terhadap pemerintah pusat.

Kelompok-kelompok *civil society* seperti akademisi, profesional, tokoh agama dan LSM tidak berseberangan dengan gerakan separatis dan tetap menjalin komunikasi dengan mereka dalam batas-batas tertentu. Hanya saja *sivil society* lebih memilih mengupayakan solusinya sendiri terhadap

pemenuhan hak-hak Muslim. Bedanya, bila gerakan separatis memanfaatkan strategi politik dan bahkan menggunakan senjata dan kekerasan bila diperlukan, maka kelompok *sivil society* lebih mengutamakan menggunakan perebutan *public sphere*, menguatkan masyarakat sipil dan menguasai media modern seperti pendidikan politik, mass media, pemberdayaan ekonomi dengan sasaran tertentu, misalnya peningkatan ekonomi keluarga, pengusaha kecil dan menengah dan usaha ekonomi perempuan.

Meskipun negara telah mendorong kelompok *civil society* untuk mendaftar pada lembaga pemerintah, hanya 15 persen yang terdaftar sebagai yayasan atau asosiasi. Banyak kelompok masyarakat sipil mencoba meng-*upgrade* jaringan biasa menjadi organisasi yang terdaftar. Sayangnya, banyak dari mereka yang kesulitan memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditetapkan pemerintah

Berdasarkan studi lapangan yang penulis lakukan, kelompok-kelompok masyarakat sipil yang terlibat dalam upaya penyelesaian konflik memiliki karakteristik yang berbeda. Tujuan utama dari kelompok masyarakat sipil di Selatan berubah setelah meningkatnya kekerasan. Di masa lalu, kelompok masyarakat sipil di selatan memiliki tujuan yang sama dengan kelompok-kelompok lain di seluruh negara yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi lokal. Sampai tahun 2004, banyak kelompok masyarakat sipil yang bergeser perannya begitu juga dengan kelompok masyarakat sipil yang baru terbentuk dimana lebih peduli pada penyelesaian konflik dan membangun perdamaian.

B. Kekuatan

Sektor masyarakat sipil yang berurusan dengan konflik di wilayah selatan memiliki potensi untuk tumbuh karena memiliki sejumlah faktor internal yang kuat dan banyak peluang yang dapat meningkatkan kemampuan dan membantu kelompok untuk tampil lebih baik. Kelompok masyarakat sipil di selatan telah menciptakan dua kekuatan dari ‘nilai-nilai bersama’ termasuk ruang umum dan keragaman. Mereka memiliki ‘Struktur’ yang fleksibel dan ‘Sistem’ yang efektif termasuk database yang komprehensif dan status keuangan yang sehat. Kekuatan signifikan dari masyarakat sipil saat ini adalah juga ‘Style’ kepemimpinannya yang unik.

Dalam hal peluang eksternal, yang menyangkut elemen ‘Politik’, kelompok masyarakat sipil sangat didorong oleh pemerintah. Faktor ‘Ekonomi’ memberikan kesempatan yang baik untuk pendanaan, terutama dukungan keuangan oleh lembaga-lembaga internasional. Penduduk setempat, sebagai bagian dari elemen ‘Sosial’, tertarik untuk berpartisipasi

dalam proyek-proyek mereka dan untuk berbagi pengalaman. Akhirnya, elemen 'Teknologi' juga menawarkan berbagai saluran untuk meningkatkan komunikasi kelompok mereka.

Menariknya, faktor pemerintah menjadi variabel penting bagi sektor masyarakat sipil karena dapat dianggap menguntungkan atau merugikan tergantung pada keadaan dan perspektif masing-masing kelompok masyarakat sipil. Beberapa kelompok masyarakat sipil melihat pemerintah sebagai kesempatan untuk sumber pendanaan yang berkelanjutan sementara kelompok lain tidak pernah mengandalkan negara atau mereka bahkan melihat negara sebagai ancaman.

Meskipun sektor masyarakat sipil memiliki banyak faktor kuat yang menjadi kekuatan, ada beberapa kelemahan yang menimbulkan kekhawatiran

C. Kelemahan

Ada sejumlah kelemahan dan ancaman yang dihadapi sektor masyarakat sipil. Ada empat masalah, yaitu sumber daya manusia, manajemen waktu, pengaruh dari sumber-sumber pendanaan, dan isu-isu politik dan keamanan, yang telah peneliti identifikasi sebagai hal penting dan yang dapat memiliki dampak serius pada sektor masyarakat sipil. Hal ini karena faktor-faktor ini adalah unsur-unsur yang menjaga keberlangsungan kelompok masyarakat sipil. Tanpa staf, waktu, uang dan lingkungan yang aman, setiap pekerjaan tidak dapat dilakukan. Faktor eksternal, unsur politik dan ekonomi, juga dianggap penting karena sulit dikontrol dan memiliki pengaruh yang tinggi pada karya masyarakat sipil.

Masalah-masalah yang menyangkut sumber daya manusia adalah kualifikasi staf, kebutuhan terhadap lebih banyak spesialis dan keterampilan orang-orang yang bekerja di sektor ini. Juga, bahasa adalah penghalang dalam komunikasi antara penduduk setempat dan kelompok masyarakat sipil. Mengingat sebagian besar uang telah disalurkan ke wilayah ini, uang telah secara bertahap merubah orang yang bekerja di sektor masyarakat sipil dari yang semula bekerja berdasarkan semangat sukarela menjadi berorientasi uang. Ketika uang yang terlibat, orang menjadi lebih egois dan memikirkan terlebih dahulu kepentingan mereka sendiri.

Kendala lain bagi masyarakat sipil adalah kurangnya waktu. Manajemen waktu adalah masalah bagi banyak kelompok karena pegawainya biasanya memiliki pekerjaan penuh waktu. Ini adalah perjuangan bagi mereka untuk mengelola dan mendedikasikan waktu untuk bekerja sukarela. Terkadang sulit mengatur waktu untuk pertemuan kelompok dan menghadiri

konferensi yang mungkin berguna untuk kelompok mereka.

Dukungan keuangan adalah penting bagi keberhasilan sektor masyarakat sipil dalam menyelesaikan konflik etno-religius dan hal ini telah mengakibatkan berbagai masalah. Banyak kelompok masyarakat sipil di wilayah ini secara finansial disponsori oleh organisasi internasional. Jenis-jenis dana biasanya hanya untuk jangka pendek dan tidak berkelanjutan. Meskipun tidak sulit bagi kelompok masyarakat sipil untuk mencari sponsor, aliran dana mungkin menjadi masalah. Sektor masyarakat sipil harus independen untuk tujuan dan kegiatan yang mereka melakukan. Dalam kenyataannya sebagian besar kelompok tergantung pada sumber pendanaan. Sejumlah besar dana telah menyebabkan konflik antara orang-orang di jaringan masyarakat sipil karena mereka bersaing mencari sponsor.

Faktor politik memiliki dampak yang kuat pada kegiatan masyarakat sipil. Situasi politik yang tidak stabil di Thailand membuat masyarakat sipil sulit menjalankan proyek-proyek mereka secara terus menerus. Hal ini karena setiap kepala negara yang memerintah, memiliki fokus yang berbeda dalam kebijakan. Kepemimpinan baru memiliki gayanya masing-masing dalam menangani masalah pemberontakan.

Masalah keamanan pribadi adalah masalah lain. Masalah keamanan ini menghalangi penduduk setempat untuk berpartisipasi dalam jaringan masyarakat sipil karena mereka takut hidup dan keamanan harta benda mereka menjadi target kelompok pemberontak.

D. Meningkatkan Kinerja

Berdasarkan analisis terhadap faktor internal dan eksternal sektor masyarakat sipil, ada beberapa rekomendasi dalam rangka meningkatkan kegiatan masyarakat sipil. Tiga rekomendasi penting yang dapat membantu untuk meningkatkan kinerja kelompok masyarakat sipil, peneliti anggap paling penting adalah kepercayaan, memahami kebutuhan penduduk setempat, dan strategi.

Bekerja di daerah konflik sangat sensitif dan memerlukan beberapa derajat kepercayaan dari pihak-pihak terkait, misalnya, pemerintah, pejabat negara, kelompok masyarakat sipil dan masyarakat lokal. Dengan demikian, waktu, kesabaran dan keterlibatan yang mendalam diperlukan oleh masyarakat sipil untuk bekerja dengan orang-orang lokal di daerah konflik. masyarakat sipil harus berperan dalam membuat Muslim di selatan mengubah persepsi negatif mereka tentang negara dan belajar untuk percaya pada instansi pemerintah. Pada saat yang sama, pemerintah harus mencoba menawarkan kesempatan bagi kelompok masyarakat sipil untuk

menyampaikan pendapat mereka, dan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan dan untuk mengelola beberapa hal.

Kelompok masyarakat sipil harus bekerja berdasarkan pendekatan *bottom-up* tergantung pada kebutuhan masyarakat setempat. Mereka harus mencoba mencari tahu apa kebutuhan yang sebenarnya dari masyarakat di wilayah ini dalam rangka memenuhi kebutuhan penduduk setempat, daripada hanya mengikuti rencana yang berasal dari pemerintah pusat. Idealnya, kelompok masyarakat sipil harus dimulai dan dibentuk oleh penduduk setempat yang sadar dengan kewarganegaraan mereka dan menjadi bagian dari masyarakat. Selain itu, jaringan masyarakat sipil harus mencoba untuk membuat orang memahami peran mereka dan bagaimana terlibat dalam kegiatan masyarakat sipil.

Hari ini, konflik bersifat dinamis dan ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja kelompok masyarakat sipil. Oleh karena itu, kelompok masyarakat sipil harus secara jelas mengidentifikasi visi mereka, tujuan dan rencana untuk mencapai tujuan mereka. Sementara beberapa faktor yang dapat dikontrol, banyak yang tidak. Untuk memastikan kelompok ini bertujuan ke arah yang benar, memiliki rencana strategis adalah ide yang berguna. Ini adalah kesempatan yang baik untuk kelompok untuk menilai faktor internal dan mendalam mereka yang dapat menguntungkan atau merugikan. Kemudian, rencana kerja yang cocok dapat ditentukan untuk membantu kelompok bertahan hidup dalam keadaan yang dinamis dan untuk mencapai tujuan mereka.

E. Rekomendasi untuk studi lebih lanjut

Konflik etno-religius di provinsi paling selatan adalah konflik berkepanjangan yang tampaknya sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, konflik ini telah menjadi perhatian banyak warga Thailand. Kekerasan sedang berlangsung meskipun masing-masing pemerintah telah berusaha untuk mengakhiri operasi gerilyawan di daerah ini. Bagaimanapun, tidak banyak penelitian tentang sektor masyarakat sipil dan hubungannya dengan konflik di Thailand Selatan[92] Peneliti dapat memilih melakukan studi terhadap salah satu kategori tertentu dari kelompok masyarakat sipil mengenai kegiatan mereka dan bagaimana mereka terlibat dalam menciptakan perdamaian di daerah ini.

Pendanaan adalah variabel rumit bagi kelompok masyarakat sipil di Selatan. Pendanaan dapat dianggap sebagai peluang maupun ancaman. Salah satu area studi lebih lanjut dapat juga tentang pengaruh sumber pendanaan

92 14 S21/45

pada sektor masyarakat sipil dalam upaya menyelesaikan konflik di provinsi tersebut.

Kebanyakan orang ingin melihat kerjasama yang lebih besar antara kelompok-kelompok masyarakat sipil dalam menyelesaikan konflik di wilayah ini. Hal ini karena diyakini bahwa jaringan yang lebih luas dapat membuat perubahan yang lebih baik. Area studi lebih lanjut lainnya yang disarankan adalah sekitar lapisan sektor masyarakat sipil. Karena meningkatnya kekerasan, ada banyak kelompok yang ingin terlibat pada solusi konflik. Kelompok masyarakat sipil telah terbagi dalam masyarakat dengan kelas sosial, pendidikan atau wilayah. Faktor-faktor ini telah melebarkan kesenjangan antara sektor masyarakat sipil dan akar rumput.

Penelitian lebih lanjut berfokus pada kemungkinan membawa solusi politik ke dalam praktek, dan model mana yang paling cocok direkomendasikan untuk Thailand. Jaringan masyarakat sipil telah aktif dalam memobilisasi perdebatan luas terkait beberapa bentuk pengaturan administrasi khusus, atau otonomi daerah, termasuk usulan berbagai model pemerintahan baru di selatan; misalnya, konsep "The Monthon"[93] oleh Prawase Wasi dan model " Biro Administrasi Pembangunan Perbatasan Selatan' (SBPDAB) "[94] oleh Srisompob Jitpiromsri.

93 Duncan Mc. Cargo, "Autonomy for Southern Thailand: Thinking the Unthinkable?" Pacific Affairs 83, no. 2 (June 2010): 268.

94 Ibid., 270.

DAFTAR PUSTAKA

Abou El Fadl, Khaled, "*Islamic Law and Muslim Minorities: e Juristic Discourse on Muslim Minorities from 8th to 17th Century CE / 2th to 11th Century Hijrah*" MUIS Occational Papers Series, Singapore, 2006.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh al-Aqalliyyât al-Muslimât, Hayât al-muslimîn Wasatal-Mujtama`âtal-Ukhrâ,* (Beirut: Dar al-Syuruq, 2001).

Ashok, Swain, "Democracy, Minority Rights and Conflict Prevention in Asia," in Ciska Raventos [ed], *Democratic Innovation in the South: Participation and Representation in Asia, Africa and Latin America*, Buenos Aires: Clacso Books, 2008.

Appleby, R. Scott, *The Ambivalence of the Sacred, Religion, Violence, and Reconciliation*, New York: Rowman & Little eld Publishers Inc., 2000.

Aphornasuvan, Thanet, "Nation-State and the Muslim Identity in the Southern Unrest and Violence," dalam Imtiyaz Yusuf dan Lars Peter Schmidt, eds. *Understanding Conflict and Approaching Peace in Southern Thailand*, Bangkok: KAS, 2006.

Brown, Davis, *From Pheriperal Communities to Ethnic Nation*, Pasific Affairs 61, 1988.

Cox, Robert W. "Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay on Method," dalam James Martin, ed. *Gramsci, Antonio, Critical Assessments of Leading Political Philosopher,* New York: Routledge, 2002.

Che Man, W.K. *Muslim Separatism: Moro of Southern Philippines and the Malays of Southern Thailand*, Manila: Ateneo de Manila University Press, 1990.

El Fadl, Khaled Abou "*Islamic Law and Muslim Minorities: e Juris- tic Discourse on Muslim Minorities from 8th to 17th Century CE / 2th to 11th Century Hijrah*" MUIS Occational Papers Series, Singapore, 2006.

Funston, John, *Malaysia and Thailand's Southern Conflict; Reconciling Security and Ethnicity*, Contemporary Souteast Asia, A journal of International and Strategic Affairs, Vol. 32, Number 2, August 2010.

Gramsci, Antonio, "State and *Civil society*," dalam Arachana Shama and Akhil Gupta, eds. *The Antropology of the State: A* Reader (Victoria: Blackwell Publishing, 2006.

Gutmann, Amy, *Identity in Democracy*, New Jersey: Princeton University Press, 2003.

Hirji, Zulfikar , "Debating Islam from Within: Muslim Constructions of the Internal Other," dalam Zulfikar Hirji, ed. *Diversity and Pluralism in Islam: Historical and Contemporary Discourses among Muslims*, New York, I.B. Tauris & Co. Ltd., 2010.

Hooker, M.B. *Islam in South-East Asia,* Leiden: E.J. Brill, 1988.

Tosh, John, *The Pursuit of History: Aims, Methodes and Directions in the Study of Modern History,* London and New York: Longman, 1986.

Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara,* Pekanbaru: Alaf Baru & Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Suska Riau, 2014.

Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: UI Press, 1985.

Klandermens, Bert, "Transient Identities? Memberships Pattern in the Dutch Peace Movement," dalam Enrique Laraňa et. al., ed. *New Social Movements from Ideology to Identity*, Philadelphia: Temple University Press, 1994

Kuntowijoyo, *Metodology Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994.

Kymlicka, Will dan Baogang He, ed., *Multiculturalism in Asia*, New York: Oxford University Press, 2005.

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah,* Yogyakarta: Bentang, 1995.

Kartodirdjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodelogi Sejarah,* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Laclau, Ernesto, "Introduction" dalam *The Making of Political Identities*, New York: Verso, 1994.

Lagerspetz, Eerik, The Philosophy of Democracy and the Paradoxes of Majority Rule, dalam *Finnish Yearbook of Political Thought*, *Vol.1, 1997.*

Mahakanjana, Chandra-nuj, *Decentralization, Local Government, and Socio-Political Conflict in Southern Thailand*, East-West Center Washington Working Papers, Washington, No. 5, Agustus 2006.

Mc Cartan, Brain and Shawn W Crispin, "An Atol Investigation, Southern Test for New Thai Leader", http://www.atimes.com/atimes/Southeast_

Asia/JL2Aeo2.html (Diakses pada 23 December 2008)

Melvin, Neil J., *Conflict in Southern Thailand: Islamism, Violence and the State in the Patani Insurgency,* (Sweden: Stokholm International Peace Research Institute, 2007

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Nurakkate, Chumphot, *The Conflict in Southern Thailand,* Centre for Defence and Strategic Studies, Australian Defence College, 2012

Pitsuwan, Surin, *Islam and Malay Nationalism: A Case Study of the Malay Muslims of Southern Thailand,* terj. Hasan Basri, Jakarta: LP3ES, 1989.

Ryan, Stephen *, Ethnic Conflict and International Relations*, Hants: Dartmouth Publishing Company, 1990.

Reimann, Cordula "*Assessing the State-of-the-Art in Conflict Transformation*," Research Center for Constructive Conflict Management 2004, http://www.berghof- handbook.net/documents/publications/reimann_handbook.pdf (diakses tanggal 13 January 2013).

Suaedy, Ahmad, dkk. *Islam dan Kaum Minoritas: Tantangan Kontemporer*, Jakarta: The Wahid Institute, 2012.

Siddiqi, Muhammad Yasin Mazhar, *Prophet Muhammad SAW: A Role Model for Muslim Minorities*, Leicestershire: Islamic Foundation, 2006.

Thongpoon, Kumpee*, Peace Education in the Universities of Southern Thailand,* Faculty of Political Scince, Hatyai University, Songkhla, November 2013.

United Nations, *Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation,* (New York and Genewa: United Nations, 2010.

Manger, Leif , ed. *Muslim Diversity, Local Islam in Global Contexts*, Surrey Great Britain: Curzon Press, 1999.

Muslim Population by Country: How Big will each Muslim Population be by 2030, theguardian.com.

Islam by Country, en.m.wikipedia.org.

Buddhist–Muslim Inter-religious Dialogue in Songkhla, Thailand, https://www.peacemakersnetwork.org/buddhist-muslim-inter-religious-dialogue-songkhla-thailand/ diakses pada 10 November 2016.
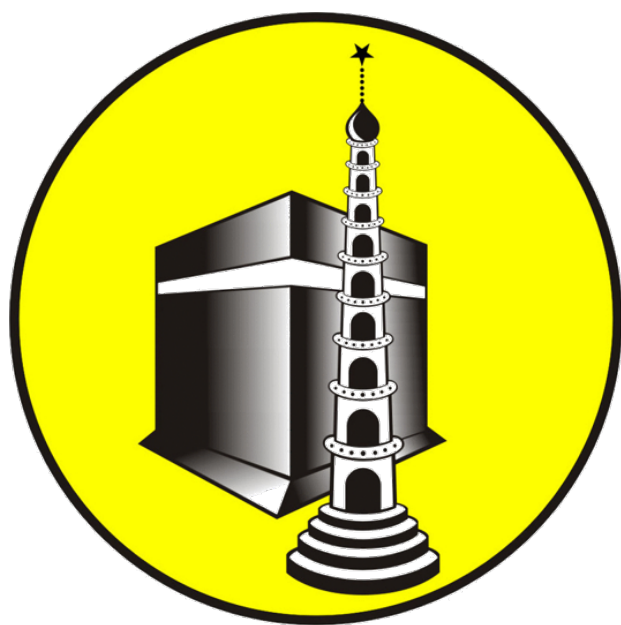
PONDOK PESANTREN "WALI SONGO" NGABAR
PONOROGO - INDONESIA

Helmiati

Prof. Dr. Helmiati, M.Ag., (lahir di Kampar, 22 Februari 1970) adalah seorang guru besar bidang **Ilmu Sejarah Islam Asia Tenggara** di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saat ini Prof. Helmiati mendapatkan tugas tambahan sebagai Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga UIN Suska Riau (periode 2014-2018 dan 2021-sekarang)[1][2].

Prof. Helmiati, aktif menuliskan buah fikiran dan penelitiannya dalam bentuk buku dan artikel yang dipublikasikan di berbagai jurnal ilmiah. Guru besar alumni Pondok Pesantren "Wali Songo" Ngabar ini aktif berbagai organisasi akademik, keagamaan, dan sosial baik di tingkal nasional, regional, maupun internasional[3].

Prof. Dr.
Helmiati
M.Ag.

Informasi pribadi	
Lahir	22 Februari 1970 Kabupaten Kampar, Riau
Kebangsaan	Indonesia
Suami/istri	Kaharudin Yazid, M.Si.
Orang tua	H. Syaichoni Salim, A.Md. (Ayah) Yusnidar Gani (Ibu)
Alma mater	Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar UIN Sultan Syarif Kasim Riau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Profesi	Dosen Guru Besar Bidang Sejarah Islam Asia Tenggara

Sunting kotak info (https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Helmiati&action=edit§ion=top&editintro=Templat:Kebijakan_biografi_aktual) • L • B

Pendidikan

Prof. Dr. Helmiati, M.Ag., mendapatkan pendidikan formal melalui satuan/instansi/lembaga pendidikan berikut ini:

- SD Negeri 02 Batu Belah, Kab. Kampar, Prov. Riau
- Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang, Kab. Kampar, Prov. Riau
- Madrasah Aliyah (MA) Wali Songo Putri di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur
- S1 Tarbiyah di Institut Agama Islam Riyadhatul Mujahidin (IAIRM), Ngabar, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur
- S1 Pendidikan Bahasa Arab, IAIN Sulthan Syarif Qosim (Susqo) Riau
- S2 Jurusan Perkembangan Islam di Asia Tenggara, IAIN Sultan Syarif Kasim Riau

- S3 Sejarah Peradaban Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (lulus 2006)

Tugas Tambahan

Prof. Dr. Helmiati, M.Ag., selama menjadi dosen di UIN Suska Riau telah mendapatkan amanah tugas tambahan, diantaranya[4]:

- Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (2004-2009)
- Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (2009-2013)
- Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (2014-2018)
- Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (2021-sekarang)

Karya Tulis

Prof. Dr. Helmiati, M.Ag., telah menerbitkan berbagai karya tulis diantaranya[5][6]:

- Buku Genealogi Intelektual Melayu: Tradisi dan Pemikiran Islam Abad ke-19 di Kerajaan Riau-Linggau (2008)
- Buku Sejarah Islam Asia Tenggara (2014)
- Monograf Internasionalisasi Nilai dan Budaya Damai pada Pendidikan Madrasah dan Pesantren dalam rangka Transformasi Konflik di Thailand Selatan (2022)
- Monograf Pergulatan Minoritas Muslim Thailand: Menelisik Peran Akademisi, Tokoh Agama dan LSM dalam Upaya Mencari Solusi Konflik Berkepanjangan (2022)
- Artikel berjudul, “Nurturing Islamic and Socio-political Thoughts in Riau and Beyond (Exploring Raja Ali Haji’s Works)”, dipublikasikan dalam Journal of Al-Tamaddun, Vol. 16 (2), 2021
- Artikel berjudul, “Muslim Religiosity in a Challenging Secular State of Singapore”, dipublikasikan dalam Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS) Volume 9, Number 2, 2021
- Artikel berjudul, “Madrasah Education in Secular, Modern and Multicultural Singapore: Challenges and Reforms”, dipublikasikan pada Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah Volume 17, Number 1, May 2021
- dan lain-lain.

Referensi

1. hendry (2022-08-04). "Dirjen Pendis Kukuhkan Empat Guru Besar UIN Suska Riau". *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-08-22.
2. Pos, Riau (2022-08-05). "Empat Guru Besar UIN Suska Riau Dikukuhkan". *RiauPos.co*. Diakses tanggal 2022-08-22.
3. "Selamat dan Sukses: Prof. Dr. Helmiati, M.Ag. dan Prof. Dr. Muhammad Syaifudin, M.Ag. – PENDIDIKAN EKONOMI". Diakses tanggal 2022-08-22.
4. "Buka Dua Prodi, Helmiati Menyebutnya Embrio Fakultas Kedokteran". *Gagasan Online*. 2015-10-30. Diakses tanggal 2022-08-22.
5. "Author Details". *journals.ums.ac.id*. Diakses tanggal 2022-08-22.
6. Helmiati; (2008). *Dinamika Islam Asia Tenggara/Helmiati*. Suska Press. ISBN 978-602-8410-76-2.
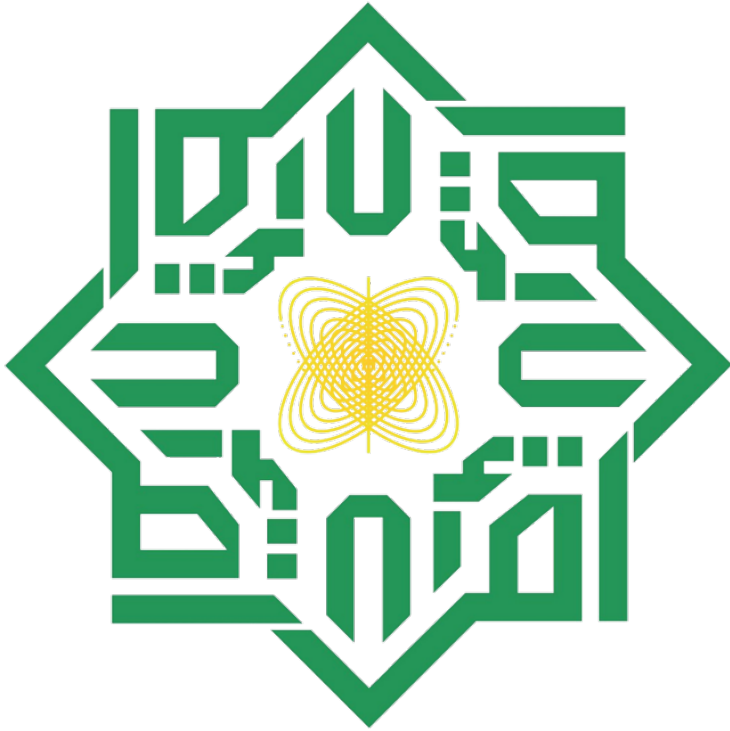
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Sultan Syarif Kasim

PEKANBARU – RIAU

MONOGRAF

PERGULATAN MINORITAS MUSLIM THAILAND

Menelisik Peran Akademisi, Tokoh Agama & LSM dalam Upaya Mencari Solusi Konflik Berkepanjangan

Di Thailand Selatan telah lama terjadi konflik antara minoritas Muslim (separatis) dengan pihak pemerintah. Di tengah pusaran konflik dan kekerasan yang terjadi, ada realitas yang menarik, yaitu menguatnya gerakan yang berorientasi perdamaian, dimana terdapat pihak-pihak yang terus-menerus mengusahakan terjadinya perdamaian dan mencari solusi konflik antara minoritas Muslim dan pemerintah pusat tanpa harus mereduksi prinsip-prinsip tuntutan atau aspirasinya. Mereka adalah dari kalangan akademisi, kalangan terdidik, budayawan, tokoh agama dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Kalangan terdidik seperti akademisi, tokoh agama dan LSM memainkan peran penting dalam membangun perdamaian di Thailand Selatan. Mereka mengambil strategi non-partisan atas kelompok-kelompok separatis yang sudah ada. Mereka lebih menekankan pada penyadaran masyarakat melalui penguatan ekonomi dan artikulasi politik melalui pembangunan kesejahteraan dan penyelesian masalah-masalah sosial yang rentan terhadap konflik, ketimbang memobilisasi masyarakat untuk membentuk gerakan tertentu. Mereka memanfaatkan keterbukaan untuk mengungkapkan agenda dan misinya kepada publik baik melalui media massa, publikasi, orasi, seminar, ceramah agama maupun melalui pengembangan SDM dan kapasitas masyarakat secara langsung. Hal ini menampakkan harapan baru bagi tercapainya suatu solusi yang lebih substansial bagi perdamaian.